

**IMPLIKASI SOSIAL PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KARAVE
KABUPATEN MAMUJU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

SYAHRANI NASRIA

10538 2971 14

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
AGUSTUS 2018**

MOTTO

Kesuksesan tidak akan bertahan

jika dicapai dengan jalan pintas

Kupersembahkan karya

yang sederhana ini kepada kedua orang tua ku

atas segala doa dan kasih sayang yang dicurahkan oleh beliau

ABSTRAK

Syahrani Nasria. 2018. Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. Program Studi Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi. Dibimbing oleh Jasruddin dan Syarifuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa karave kabupaten mamuju utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa karave menggunakan data primer berupa informasi yang diperoleh yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa setelah pemekaran desa karave memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa karave kabupaten mamuju utara. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan sarana jalan yang cukup meningkat dari sebelum pemekaran, selain itu sarana pemerintahan pun juga meningkat. Pada pemekaran desa tidak terlepas pada faktor pendorong dan penghambat terjadinya pemekaran. Pada pemekaran Desa Karave pemerintah sangat mendukung. Pemerintah yang sebagai pelayanan publik memberikan fasilitas-fasilitas guna melancarkan proses pemekaran. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mengsinergikan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Paad desa karave keterbatasan sumber daya manusia aparat desa disitu mengalami kendala dalam proses pengelolaan dana, karena di dalam proses tersebut dibutuhkan keahlian dalam pengelolaan tersebut.

Kata Kunci: Implikasi, Pemekaran, Kesejahteraan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan dan hidayah-Nya. Tuhan Yang Maha Pemurah yang kepada-Nya segala munajat tertuju. Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kasih dan sayang kepada beliau beserta keluarga, sahabat-sahabat dan teman-teman.

Penulisan ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Disamping memberikan pengalaman kepada penulis dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis. Sehubungan dengan hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan dorongan serta doa dari ibu Rosmala Aras dan Bapak Andi Syarifuddin. Untuk itu, dari lubuk hati paling dalam saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, motivasi dan dukungannya serta telah menjadi orang tua terbaik bagi saya.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung tercapainya karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan

kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Erwin Akib, M. Pd., P. hD. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Drs. H. Nurdin, M. Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Prof. Dr. Jasruddin, M. Si, selaku **Pembimbing I** yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Syarifuddin, S. Pd., M. Pd, selaku **Pembimbing II** yang selama ini telah banyak memberikan ide, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Buat sahabat-sahabatku yang telah memberikan dorongan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Namun penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, semua itu dikarenakan keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan hati terbuka

atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memiliki guna dan manfaat bagi
perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

Syahrani Nasria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Tori	11
1. Konsep Pemekaran Wilayah atau Daerah	12
2. Arti Dan Makna Pembanguna.....	18
3. Konsep Kesejahteraan	24
4. Analisis Teori	31
5. Penelitian Relevan.....	38
B. Kerangka Konsep.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Informan Penelitian	46
D. Fokus Penelitian	46
E. Instrument Penelitian	47
F. Jenis dan Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Analisis Data	49
I. Teknik Keabsahan Data	49
J. Jadwal Penelitian	51

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Mamuju Utara.....	52
B. Deskripsi Khusus Desa Karave sebagai Latar Penelitian	52

BAB V DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH

A. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73
C. Interpretasi Hasil Penelitian	76

BAB VI FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PEMEKARAN

A. Hasil Penelitian	81
B. Pembahasan Hasil Penelitian	86

C. Interpretasi Hasil Penelitian	90
D. Cara Kerja Teori	94

BAB VII SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan merupakan salah satu faktor penyebab terlambatnya percepatan pertumbuhan pembangunan di daerah dari berbagai sektor, hal ini merupakan polemik yang berkepanjangan sehingga perlu adanya sebuah terobosan dimana pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah dapat merata, terlebih lagi dengan masih begitu banyaknya potensi-potensi di daerah yang belum maksimal dikelola sehingga belum memberikan efek bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.

Semenjak proses reformasi di Indonesia berlangsung, telah menghadirkan paradigma baru penyelenggaraan pemerintah daerah. Rekonstruksi pemerintah daerah yang hadir sejak reformasi memberikan banyak implikasi atau dampak terhadap masyarakat. Dampak atau implikasi yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah keinginan untuk memekarkan daerahnya baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai pada desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar proses pengelolaan potensi daerah dapat dikelola secara maksimal, sehingga percepatan pembangunan dapat terealisasi. Khususnya lagi dengan

pemekaran daerah, proses pelayanan publik, sosial dan ekonomi dapat dilakukan secara efektif atau dengan kata lain proses pelayanan publik dapat dipermudah serta di perpendek oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilayani, sehingga proses pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat terlaksana.

Program pemekaran desa/kelurahan pula memiliki maksud yang lebih besar yakni dengan program pemekaran desa/kelurahan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan harapan serta tujuan dari pemekaran tersebut. Pembangunan merupakan permasalahan pokok bagi masyarakat bangsa-bangsa berkembang. Pembangunan berkenaan dengan kebebasan dan kemampuan bangsa, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terentaskannya kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, politik demokratis, kesetaraan jender, kemajuan iptek, dan inovasi keamanan (security), serta berkelanjutan lingkungan merupakan parameter-parameter penting pembangunan yang makin menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan desa lebih mengarah pada ketersediaan infrastruktur serta percepatan pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah.

Kaitannya dengan pengembangan wilayah, sekarang ini telah dibentuk suatu program pemerintah tentang pengembangan wilayah yang disebut pemekaran. Program ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang

menerangkan adanya peranan masyarakat lokal dalam mengelola berbagai potensi untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan majunya suatu daerah baik itu di sektor ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan pemekaran daerah adalah salah satu jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sangat tergantung kepada manajemen birokrasi pemerintah sumber daya manusia dan sumber daya alami suatu daerah. Selain itu, dalam peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dijelaskan pula tentang tata cara pembentukan wilayah, penggabungan serta penghapusan suatu wilayah namun tidak dijelaskan tentang berapa besar indikator jumlah penduduk yang harus dipenuhi oleh sebuah wilayah untuk melakukan sebuah pemekaran. Dalam peraturan pemerintah lebih ditekankan kepada pemanfaatan potensi-potensi yang ada di daerah pemekaran agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Dalam proses pemekaran desa, Widjaja mengemukakan bahwa syarat jumlah penduduk yang harus dipenuhi adalah jumlah pendudukan untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK, dan wilayah Kalimantan, dan NTB serta Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK, lebih lanjut, di jelaskan bahwa persyaratan suatu desa/kelurahan yaitu jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 KK (Widjaja, 2000 :109)

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dengan melihat berbagai potensi yang ada di desa pemerintah desa bersama-sama dengan berbagai lembaga yang ada di desa mengadakan pemekaran wilayah, namun dalam hal pemekaran wilayah yang dilakukan pemerintah sebelum dikeluarkan undang-undang otonomi daerah tahun 1999 tidak dijelaskan beberapa besar indikator jumlah penduduk yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah untuk melakukan pemekaran. Selain itu, yang menjadi syarat dalam pembentukan/pemekaran wilayah adalah pemanfaatan potensi yang ada di wilayah pemekaran. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sedangkan daerah otonom atau disebut juga dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meningkatnya jumlah daerah baru tidak terlepas dari semangat otonomi serta terbitnya PP. No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan, dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Keinginan yang kuat dari daerah terkait pelaksanaan kebijakan otonomi dan peluang yang ada berdasar PP No. 129 Tahun 2000, mengakibatkan banyak daerah melakukan usulan pemekaran dibandingkan penghapusan maupun penggabungan daerah. Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat Provinsi, tetapi juga di

tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa ataupun Kelurahan yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000 ditegaskan bahwa tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa aspek yaitu: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Reformasi tahun 1998 melahirkan tuntunan desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan UU No. 5/1974 menjadi UU No. 22/1999 yang belakangan direvisi lagi menjadi UU No. 32/2004, dengan keluarnya UU tersebut, daerah banyak yang menuntut adanya pemekaran. Pembentukan daerah baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pemebentukan daerah dapat terwujud. Sesuai dengan tujuan utama dari pemekaran yaitu pelayanan dan kesejahteraan baik daerah yang dimekarkan maupun daerah induk, salah satu indikator dari kesejahteraan suatu daerah adalah tingginya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pemekaran daerah perlu dilakukan evaluasi karena untuk melihat pencapaian

tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat perkembangan pembentukan daerah otonom baru saat ini sangat berkembang pesat, dan tidak jarang menimbulkan implikasi kebijakan, seperti menimbulkan dampak negatif maupun positif. Selama ini yang mengusulkan pemekaran daerah adalah daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau daerah induk dan tidak mendapatkan pemerataan pelayanan publik. Kenyataannya, pertimbangan pemekaran daerah saat ini bukan menjadi pertimbangan pelayanan publik atau pemerataan pembangunan, akan tetapi lebih usul kelompok elit, kelompok elit yang dimaksud adalah pejabat yang ingin kembali berperan dalam politik dengan kata lain pemekaran daerah saat ini lebih pada pertimbangan kepentingan politik.

Pada dasarnya pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui otonomi daerah. Akan tetapi pada saat ini, masih banyak daerah atau desa pemekaran belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau belum terwujud. Hasil study dampak pemekaran daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) menyebutkan, daerah pemekaran baru ternyata tidak berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Studi Bappenas dan UNDP ini, secara keseluruhan dilakukan di 6 provinsi dan 72 kabupaten/kota, meliputi 10 kabupaten induk, 10 kabupaten daerah otonom baru dan 6 kabupaten kontrol.

Studi selama 2002-2007 ini difokuskan untuk melihat aspek ekonomi daerah pemekaran, keuangan daerah, pelayanan publik, dan aparatur pemerintah daerah. Hasilnya, selama lima tahun dimekarkan, kondisi daerah otonom baru masih berada di bawah kondisi daerah induk atau daerah kontrol. Penduduk miskin menjadi terkonsentrasi di daerah otonom baru, study UNDP juga menemukan penyebab kondisi tersebut didominasi keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah-daerah hasil pemekaran.

Secara umum, daerah otonom baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Bahkan evaluasi selama lima tahun perjalanannya, daerah otonom baru secara umum masih tertinggal. Di sisi ekonomi, ketertinggalan daerah otonom baru terhadap daerah induk maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung bergeraknya perekonomian melalui investasi publik. Di sisi keuangan daerah, disimpulkan bahwa peran anggaran pemerintah daerah pemekaran dalam mendorong perekonomian, relatif kurang optimal di bandingkan daerah induk.

Di sisi pelayanan publik kinerja daerah otonom baru masih berada di bawah daerah induk. Kinerja pelayanan publik daerah otonom baru dan daerah induk secara umum masih di bawah kinerja pelayanan publik di daerah kontrol maupun rata-rata kabupaten. Di sisi kinerja aparatur pemerintah daerah otonom baru dan daerah otonom induk menunjukkan fluktuasi meskipun dalam dua tahun terakhir posisi daerah induk masih lebih baik dari pada

daerah otonom baru. Jumlah aparatur cenderung meningkat selama lima tahun pelaksanaan kebijakan pemekaran, namun masih ditemukan rendahnya kualitas aparatur di daerah otonom baru.

Bulutaba adalah kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Bulutaba merupakan hasil pemekaran dari kecamatan baras. Kecamatan ini sebagai salah satu kecamatan termuda di Kabupaten Mamuju Utara. Atas dasar kondisi sarana dan prasarana ekonomi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implikasi Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karave Kecamatan Bulutaba”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi sosial pemekaran wilayah di Desa Karave, Kabupaten Mamuju Utara?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat proses pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karave, Kabupaten Mamuju Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi sosial pemekaran wilayah di Desa Karave, Kabupaten Mamuju Utara!

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat proses pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karave, Kabupaten Mamuju Utara!

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat dalam membangun dan pengembangan konsep dan teori dalam ilmu sosiologi khususnya yang terkait dengan fenomena yang memiliki kemiripan dengan kasus yang diangkat oleh peneliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai implikasi pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Melalui penelitian ini peneliti dapat mengimplementasikan dan memanfaatkan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti, serta menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Implikasi adalah dampak dari sesuatu, keterlibatan, yang termaksud atau terlibat akan tetapi tidak dinyatakan secara jelas (tersirat).
2. Pemekaran wilayah/daerah adalah pemisahan dari suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Sehingga pemekaran tersebut

diharapkan adanya dampak yang berpengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat sebagai berikut:

- a. Meningkatnya sarana pendidikan
 - b. Meningkatnya sarana kesehatan
 - c. Meningkatnya sarana jalan
 - d. Jenis pekerjaan
 - e. Pendapatan
3. Kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang diukur melalui indikator kesejahteraan dengan melihat dari aspek sosial dan aspek ekonomi.
 4. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Secara umum pemekaran wilayah/daerah dapat diartikan sebagai pemisah diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah. Pemekaran yang dilandasi oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka menteri pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan (4), namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. (Hasriani, 2016: 8)

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan : Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 4 dalam Undang-undang tersebut dinyatakan : Pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. (Hasriani, 2016:9)

1. Konsep Pemekaran Wilayah atau Daerah

Pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pemekaran wilayah memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut mempunyai dampak penting bagi kemajuan suatu daerah baik bidang ekonomi jelas berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk setempat. (Hasriani, 2016:10)

Rasyid (1997: 20) mengatakan bahwa pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan atau meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonom dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. (Hasriani, 2016:10)

Sebutan daerah dan wilayah agaknya belum berhasil ditemukan perbedaannya, bahkan keduanya sering dipertukarkan di dalam pemakaian sehari-hari. J. Kaloh mengatakan bahwa perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula dengan kriteria seperti administratif, politik, ekonomi, sosial, kultural, fisik, geografis dan sebagainya. (Eko Oktah S.Lariky, 2012:20)

Dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonomi baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan

pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. (Eko Oktah S.Lariky, 2012:21)

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan wilayah atau daerah otonom, seperti dalam pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah telah mempersiapkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 129 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, walaupun undang-undang tersebut telah direvisi menjadi UU nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam bab II pasal 4 sampai pasal 8 menyatakan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Persoalan sekarang adalah dengan mempertanyakan urgensi pembentukan pemekaran wilayah, dan pada saat bersamaan dengan pertimbangan bahwa penting atau tidak pentingnya pemekaran wilayah atau daerah adalah dengan melihat kembali bahwa ternyata pemekaran itu sendiri merupakan peluang yang oleh masyarakat daerah merupakan “hasil diambil” karena didukung oleh undang-undang. Pada saat itu juga mendapat dukungan

secara politik yakni dengan adanya pergerakan etnisitas masyarakat lokal.

(Eko Oktah S.Lariky, 2012:21)

Terdapat beberapa urgensi dalam pemekaran wilayah, yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan secara cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan.
- b. Memperpendek *span of control* (rentang kembali) manajemen pemerintah dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintah akan lebih efektif, efisien dan terkendali.
- c. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuh kembangkan inisiatif, kreativitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan.
- e. Khusus daerah wilayah-wilayah perbatasan atau kepulauan.

Pemekaran wilayah atau daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penataan ini telah melahirkan suatu komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan bahwa otonomi daerah merupakan format pengaturan politik yang tidak bisa ditawar-tawar dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Eko Oktah S.Lariky, 2012:22)

Pemekaran daerah menjadi provinsi, kabupaten dan kota dapat dilihat dari tiga sisi logika yaitu:

- a. Logika formal, memandang bahwa terjadinya pemekaran wilayah disebabkan adanya dukungan formal undang-undang, sekaligus dengan undang-undang ini memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berapresiasi dengan kesempatan ini, sehingga yang terjadi adalah banyak daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya masing-masing menjadi otonom.
- b. Logika realitas, memandang bahwa pembentukan daerah merupakan sesuatu yang benar-benar urgen secara realitas. Bahwa untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di daerah, alternatif pilihan terbaiknya hanyalah pembentukan dan pemekaran wilayah atau daerah.
- c. Logika politik, memandang bahwa adanya pergerakan-pergerakan sosial politik kemasyarakatan di tingkat lokal dengan ide pemekaran daerah dan pada saat bersamaan dengan membawa dan mengusung etnisitas daerah sebagai penguat menuju terjadinya pemekaran. Etnisitas menjadi motor penggerak masyarakat daerah. (Eko Oktah S.Lariky, 2012:23)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pemekaran Daerah merupakan pemecah Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah

kabupaten/kota. Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan (Dian Trisnawati, pemekaran daerah)

Studi mengenai pemekaran wilayah juga penting untuk menyempurnakan konsep otonomi daerah dan pembangunan bangsa yang multikultural di Indonesia. Selanjutnya semangat “nasionalisme lokal” atau segregasi lokal perlu dikelola oleh pemerintah pusat dengan bijak sehingga tidak menjadi ancaman bagi pembangunan nasional dan integrasi nasional. Pandangan lain yang terhadap pemaknaan pemekaran itu sendiri menjelaskan bahwa kebijakan pemekaran di seluruh daerah di Indonesia itu sangat penting tetapi dengan catatan untuk yang positif. (Pohan:2015)

Rambe Kamarulzaman (2013:30) menyatakan artinya pemekaran itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan undang-undang dan kepentingan masyarakat guna untuk mendekatkan pelayanan prima kepada masyarakat yang sangat membutuhkannya bukan sebaliknya. Tegas saya katakan pemekaran itu perlu dilakukan manakala pemekaran itu sendiri memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Karakteristik pemerintah yang demokratis dengan prinsip otonomi tentu menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah di pusat maupun di daerah. Sedangkan dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik yang baik hanya dapat dihasilkan dengan

penataan pemerintah yang baik dari tingkat pusat hingga daerah. (Lukman, 2017:261)

Pemekaran daerah sebagai aspek dari penataan daerah, menurut Michael A. Trueblood dan Beth Walter Honadle, merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintah daerah yang terdiri dari empat bentuk, yaitu : (1) Aneksasi (*anectation*) yaitu memperluas wilayah perbatasan daerahnya dengan memasukkan wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam wilayah yang ditangani. (2) Penggabungan (*consolidation/amalgamation*) yaitu penggabungan anatar dua atau lebih pemerintahan daerah yang berdampingan dan membentuk menjadi suatu pemerintahan daerah. (3) Pemekaran (*fragmentation*) yaitu pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih pemerintahan daerah. (4) Pelepasan (*detachment*) yaitu penataan ulang terhadap perbatasan wilayah dengan melepaskan beberapa bagian wilayah dari wilayah yang dilingkupinya. (Lukman, 2017:263)

Menurut Siswanto Sunarno, pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pembentukan daerah pemerintah dapat dilakukan dalam dua tipe atau bentuk, yakni berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Pemekaran wilayah ekonomi yang dimaksud peneliti adalah dengan adanya pemekaran wilayah tersebut dapat meningkatkan hasil perekonomian masyarakat di sebabkan karena adanya infrastruktur, seperti perbaikan jalan,

sehingga masyarakat lebih mudah menempuh jalan untuk melakukan aktifitas.

Pemekaran wilayah menurut para ahli dapat disimpulkan yaitu perluasan daerah dengan meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonom dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan untuk mendekatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Arti dan Makna Pembangunan

Dikebanyakan Negara berkembang istilah pembangunan merupakan salah satu konsep yang paling mengemuka dan mendesak terkait dengan pengelolaan pembangunan bangsa. Bryant dan While (1987), melihat pembangunan sebagai sebuah konsep normative dan merupakan eufemisme untuk perubahan, modernisasi, dan pertumbuhan. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi sebuah jargon dan kata kunci untuk segala aspek kehidupan. Menurut Budirman (2000), secara umum kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi. (Rakhmat 2013: 1)

Todaro (1986) mengatakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolute. Dalam pandangan ekonomi, pembangunan juga sering di definisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan

pendapatan riil kapita melalui peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya (Kartasasmita,1997). (Rakhmat. 2013: 1)

Konsep pembangunan juga dapat diartikan secara lebih luas, karena dapat diinterpretasikan dalam banyak segi. Katz (1992) menyatakan bahwa pembangunan adalah perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat,bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi seperti perubahan pendapatan perkapita dan peningktan tenaga kerja, tetapi juga mencakup perubahan-perubahan di bidang sosial dan poilitik, dimana masalah-masalah tersebut saling berhubungan satu sama lain. (Rakhmat. 2013: 1)

Bryan dan While (1987) merumuskan bahwa pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan masyarakat. Pandangan ini mengandung tiga implikasi, yaitu (1) pembangunan berarti member perhatian terhadap kapasitas (*capacity*) terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan energi untuk membuat perubahan, (2) pembangunan berarti mencakup keadilan atau pemerataan (*equity*) dalam kehidupan masyarakat, dan (3) pembangunan berarti adanya penumbuhan kekuatan dan wewenang (*empowerment*) dalam mengelola dan menerima manfaat pembangunan. (Rakhmat. 2013: 2-3)

a. Dimensi Pembangunan Sosial

Dimensi-dimensi pembangunan sosial meliputi peningkatan produktivitas, pelayanan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, dan pembangunan masyarakat. (Harry Hikmat, 2010:64)

1) Peningkatan Produktivitas (*Productivity Enhancement*)

Dimensi ini dapat menjadi area pertemuan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam hal ini pembangunan ekonomi terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia (*human resources development*). Dalam konteks pembangunan sosial-sekaligus yang membedakannya dengan konteks pembangunan ekonomi-terutama adalah dalam hal pengorganisasiannya. Pembangunan sosial lebih mengarahkan pada pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*) yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pelayanan manusia dan organisasi-organisasi sosial tingkat lokal. Tujuan utamanya berprinsip pada jargon bahwa manusia sebagai faktor produksi harus tetap sebagai subjek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebagai objek dari aktivitas ekonomi, atau objek dari segelintir kelompok yang mendominasi aktifitas perekonomian. (Harry Hikmat, 2010:64)

2) Pelayanan Sosial (*Sosial Services*)

Pelayanan sosial dalam arti luas mencakup beberapa sektor pembangunan. Juga, mencakup ruang lingkup pembangunan kesejahteraan rakyat yang merupakan subsistem pembangunan nasional. Tentang ini, Kamerman dan Kahn (1979) menjelaskan enam komponen atau subsistem kesejahteraan sosial dalam arti luas, yaitu (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*); (4) pelayanan kerja; (5) perumahan; dan (6) pelayanan sosial personal (*personal social services*). Dengan demikian, dalam konteks pembangunan sosial,

pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pelayanan kerja, dan perumahan. Sementara itu, untuk pemeliharaan penghasilan dan pelayanan sosial personal dapat berupa subsistem tersendiri sebagai bagian dari dimensi pembangunan sosial. (Harry Hikmat, 2010:64-65)

3) Pelayanan Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Services*)

Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan subsistem dari pelayanan sosial dengan intinya kepada pelayanan sosial personal (*personal social services*) dengan sasaran mencakup (1) kelompok-kelompok khusus yang membutuhkan pelayanan sosial, seperti kelompok usia lanjut, anak terlantar, korban ketergantungan obat, dll.; (2) kelompok-kelompok marginal dalam konteks ekonomi atau dalam masalah pembangunan; (3) kelompok minoritas, seperti komunitas adat terpencil; dan (4) kelompok yang mengalami kecacatan. (Harry Hikmat, 2010:65)

4) Pembangunan Masyarakat (*Community Building*)

Hakikat pembangunan masyarakat adalah *community base development* atau pembangunan masyarakat dari bawah (*bottom-up*). Ditinjau dari sisi pemerintah (*government*), pembangunan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan yang sistematis dari atas yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subjek pembangunan). Kendati demikian, dalam perencanaan pembangunan, namun pada akhirnya keterlibatan dalam proses perencanaan dari bawah sulit sekali dilaksanakan. Ini berbeda dengan pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga swadaya

masyarakat yang dapat melepaskan diri dari keterkaitan kepada struktur organisasi pemerintah, baik vertikal maupun horizontal (wilayah administrasi). Keterlepasan ikatan ini menjadikan LSM lebih leluasa dalam membangun masyarakat yang pada tataran praksisnya disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat. (Harry Hikmat, 2010:65-66)

Sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara garis besar terdiri atas dua pendekatan, yakni pendekatan perencanaan pembangunan yang merujuk pada Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pendekatan perencanaan tata ruang yang merujuk pada Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kedua perencanaan tersebut bersifat terpadu, artinya satu sama lainnya saling berkaitan. (Syaodih, 2015: 17)

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak dan asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- b. Responsive, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal
- d. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dalam sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal

- e. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Partisipatif, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan
- g. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya
- h. Berkeadilan, yaitu prinsip berkeimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia
- i. Berwawasan lingkungan, yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. (Syaodih, 2015: 18)

Berdasarkan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial dalam masyarakat dan juga perubahan tersebut berlangsung secara luas, bukan hanya pada sektor ekonomi tetapi juga pada bidang sosial dan politik.

3. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan pada umumnya disamakan dengan taraf hidup yang berarti pemenuhan kebutuhan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seorang individu atau masyarakat melakukan produksi secara luas dengan usaha peningkatan kegiatan produksi yang mempunyai hubungan timbal balik pada peningkatan pendapatan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Nurdin F. (1990 : 27) mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah salah satu keadaan aman, sentosa, makmur, dan selamat yang berarti terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Selanjutnya dalam buku pengantar pendidikan kesejahteraan keluarga dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera yang diliputi rasa aman tentram lahir dan batin oleh karena semua kebutuhan relatif hampir dapat dipenuhi. (Hasriani, 2016:20)

Menurut Poerwadarminta (1996: 39) kesejahteraan adalah aman sentosa, makmur atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial di Indonesia, dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan batiniyah sebaik-baiknya bagi diri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. (Hasriani, 2016:21)

Terdapat indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Indikator kesejahteraan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Menurut Djoyohadikusumo (1990: 63) indikator yang dapat di pergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah pendapatan perkapita dan pembagian dalam masyarakat sebagai salah satu upaya menuju keadilan sosial dilanjutkan usaha-usaha untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung termaksud mereka yang hidupnya tersaingi dan terbelakang. Usaha perbaikan pelayanan sosial tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesederhanaan serta kemampuan warga Negara untuk ikut dalam pembangunan. (Hasriani, 2016:22)

Hasriani (2016: 23) dalam Biro Pusat Statisti (1998: 1) menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antara lain adalah:

a. Pendapatan Perkapita

Menurut Todaro (1997: 16) bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara dari perspektif ekonomi maka digunakan indikator pendapatan perkapita

Menurut Jhingan (1998: 37) kenaikan pendapatn daerah pedesaan cenderung memperbaiki kesejahteraan penduduknya. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap peningkatan atau perbaikan pendapatan akan membawa harapan pada perbaikan taraf hidup. Besar kecilnya pendapatan

yang diterima oleh seorang anggota masyarakat dapat memberikan gambaran tentang dirinya, bukan saja keadaan ekonomi tetapi juga kondisi sosialnya, atau dengan kata lain tingkat pendapatan seseorang juga mempengaruhi tingkat kehidupan ekonomi masyarakat.

b. Pendidikan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.

Menurut Edwin B. Fllippo (Malayu S. P. Hasibuan 1990) pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Pemikiran ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.

c. Kesehatan

Anwar (1983: 61) berpendapat bahwa pentingnya kesehatan bagi masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu unsur penting dari kesejahteraan masyarakat usaha pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar bila mana kesehatan terganggu.

Pembangunan pada bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah. Dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Beberapa yang dapat memperburuk kesehatan masyarakat antaranya adalah rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan lingkungan yang kurang memadai.

Susanti, dkk (1995: 47) berpendapat bahwa indikator tingkat kesehatan masyarakat yakni sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan sistem sosial budaya yang tidak terlepas dari sistem yang lain seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini merupakan sasaran penelitian kesehatan bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, penelitian kesehatan dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan, baik klinik maupun kesehatan masyarakat serta masalah-masalah yang berkaitan dengan mencari bukti yang muncul dan dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat ilmiah. (Hasriani, 2016:26)

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf-taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan taraf belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual. (Adi, 2012: 34)

a. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan (kondisi)

Sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat antara lain dapat dilihat dari rumusan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1: “Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Definisi lain tentang kesejahteraan sosial yang melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi tergambar dari definisi yang dikemukakan Midgley (1995:5): “suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan”. (Adi, 2012: 34-35)

b. Kesejahteraan sosial dalam kaitan dengan pembangunan sektoral

Pendefinisian kesejahteraan sosial berdasarkan sektor pembangunan ini, antara lain terlihat dari apa yang dikemukakan Spicker (1995: 3), di mana Spicker melihat bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit itulah yang terkait dengan disiplin pekerjaan sosial (social work) yang menjadi cikal bakal berkembangnya ilmu kesejahteraan sosial. Bidang ini pada berbagai Negara ditangani oleh *Ministry of Health and Welfare*, atau di Indonesia ditangani oleh kementerian sosial. (Adi, 2012: 36)

Sedangkan untuk kasus Indonesia, kesejahteraan sosial dalam arti luas mempunyai pengertian yang tidak saja mencakup pada bidang yang ditangani

oleh kementerian sosial, akan tetapi sudah mencakup pada berbagai kementerian yang terkait dengan upaya yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termaksud pada bidang kesejahteraan rakyat serta ekonomi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Terutama pada bidang ekonomi yang terkait dengan upaya peningkatan usaha ekonomi mikro dan kecil, tanpa melupakan aspek pemerataan distribusi pendapatan (*income distribution*) dalam rangka menanggulangi kemiskinan. (Adi, 2012:36)

c. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan

Sebagai suatu kegiatan, pengertian kesejahteraan sosial dapat terlihat antara lain dari definisi yang dikembangkan oleh Friedlander (1980) : Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan). (Adi, 2012: 36)

Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan, pengertian yang dikemukakan oleh Friedlander diatas sekurang-kurangnya menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem pelayanan (kegiatan) yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun dalam pengertian yang dikemukakannya Friedlander secara eksplisit menyatakan bahwa target dari kegiatan tersebut adalah individu dan kelompok, tetapi dalam arti luas pengertian Friedlander juga melihat masyarakat sebagai suatu totalitas. (Adi, 2012: 36)

d. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu

Menurut Adi (2005: 17) ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu yang bersifat terapan, karena itu kajiannya sangat terkait dengan suatu intervensi yang bersifat terapan, karena itu kajiannya sangat terkait dengan suatu intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang dilakukan oleh pelaku perubahan (*change agents*) terhadap berbagai sasaran perubahan (*target of change*) yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil, komunitas dan organisasi dan masyarakat yang lebih luas, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, negara maupun tingkat global. (Adi, 2012: 37)

Ilmu kesejahteraan sosial, seperti pula disiplin pekerjaan sosial, merupakan ilmu yang fokus pembahasannya diarahkan pada berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya sejak era 1990-an disiplin pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial mengadopsi pendekatan pembangunan sosial, sebagai salah satu pendekatan pembangunan yang mencoba menyinergikan pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi. (Adi, 2012: 38)

Menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah salah satu keadaan aman sentosa, makmur dan selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran.

4. Analisis Teori

a. Teori Pembangunan Sosial

Definisi pembangunan sosial menurut Midgley, adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi dinamis. Mengapa direncanakan? Hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan. Rismawati (2016:30)

Rismawati (2016:30) menyatakan bahwa Midgley menganjurkan ada delapan aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. Proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi. Aspek ini membuat pembangunan sosial berbeda ketika dibandingkan dengan pendekatan lain dalam mengangkat kesejahteraan orang banyak. Pembangunan sosial mencoba untuk mengaplikasikan kebijakan-kebijakan dan program-program sosial untuk mengangkat kesejahteraan sosial, pembangunan sosial melakukannya dengan konteks proses pembangunan.
2. Pembangunan sosial mempunyai fokus berbagai macam disiplin ilmu (interdisipliner) berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Pembangunan sosial secara khusus terinspirasi dari politik dan ekonomi. Pembangunan sosial yang menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologi

secara eksplisit. Dengan isu-isu ideologis, pembangunan sosial diharapkan dapat lebih baik menciptakan intervensi dalam menganalisa dan menghadapi masalah sosial dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat.

3. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses. Pembangunan sosial sebagai konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit dimana istilah pembangunan itu sendiri lebih berkonotasi pada semangat akan perubahan yang positif. Secara literal, pembangunan adalah suatu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial memiliki tiga aspek, *pertama*, kondisi sosial awal yang akan diubah dengan pembangunan sosial, *kedua*, proses perubahan itu sendiri, *ketiga*, keadaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.
4. Proses perubahan yang progresif. Perubahan yang dilakukan berusaha untuk perbaikan bagi seluruh manusia. Ide-ide akan perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan sosial.
5. Proses pembangunan sosial bersifat intervensi. Peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial

6. Tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menghubungkan intervensi sosial dengan usaha pembangunan ekonomi. Keduanya didasari oleh keyakinan dan ideologi yang berbeda tetapi hal ini dapat diharmonisasikan meskipun masih ditemui kesulitan untuk merangkum semuanya dalam sebuah sintesa.
7. Pembangunan sosial terkait dengan rakyat secara menyeluruh serta ruang lingkungannya lebih bersifat inklusif dan universal. Pembangunan sosial fokus makronya menargetkan perhatian pada komunitas, daerah dan masyarakat. Pembangunan sosial lebih tertuju pada mereka yang terlantar karena pertumbuhan ekonomi atau tidak diikutsertakan dalam pembangunan (orang miskin dalam kota, penduduk desa yang miskin, etnis minoritas dan wanita). Pembangunan sosial fokusnya bersifat pembagian daerah (special) seperti dalam kota, masyarakat pedesaan, perkotaan, daerah-daerah atau Negara.
8. Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Midgley disini berkonotasi pada suatu kondisi sosial dimana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekedar kegiatan awal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Dari penjelasan tersebut diatas, terlihat bahwa pembangunan sosial menurut Midgley (2005:34) adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses ekonomi dan sosial sebagai

kesatuan dari proses pembangunan yang dinamis, membentuk dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Rismawati (2016:33)

Orientasi pembangunan ekonomi perlu diikuti oleh pembangunan sosial, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sosial tersebut adalah pembangkit masyarakat untuk mengubah hidupnya kearah yang lebih baik, ada tiga sasaran yang dicapai dalam pembangunan sosial, yaitu:

Pertama, meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok.

Kedua, meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu ataupun sebagai suatu bangsa.

Ketiga, memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan Negara lain

tetapi juga terdapat kebodohan dan kesengsaraan manusia. Pembangunan, dengan demikian, harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional.

Lebih lanjut Moeljarto dalam Prayitno (2009) berpendapat, bahwa sekurang-kurangnya pembangunan sosial itu memiliki tiga kategori makna yaitu (1) pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat, (2) pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi, dan (3) pembangunan sosial sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Beragamnya tujuan dan makna pembangunan sosial, maka dalam pertemuan dari UNCRD di Nogaya menerima definisi lengkap sebagai:

Pembangunan sosial tidak hanya diukur melalui peningkatan akses pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, melainkan melalui kemajuan dalam pencapaian tujuan sosial yang lebih kompleks dan kadang-kadang beragam seperti persamaan, “keadilan sosial”, promosi budaya dan ketentraman batin, juga peningkatan kemampuan manusia untuk bertindak, sehingga potensi kreatif mereka dapat dikeluarkan dan membentuk perkembangan sosial. Rismawati (2016:35)

Kemudian dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Midgley (2005:149-201) mengemukakan ada tiga strategi besar, yaitu:

1. Pembangunan sosial oleh individu, dimana kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diangkat ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing. Pendekatannya lebih mengarah pada pendekatan individualis dan pendekatan enterprise (usaha).
2. Pembangunan sosial oleh masyarakat, di mana masyarakat saling bekerja sama secara harmonis serta memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan permasalahan mereka dan berusaha menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup. Pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan kemasyarakatan.
3. Pembangunan sosial oleh pemerintah, dimana pembangunan sosial dilakukan oleh pemerintah, dengan agen-agensya yang khusus pembuatan kebijakan, para perencana dan administraturnya. Negara mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memiliki tanggung jawab mengangkat kesejahteraan seluruh warganegaranya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan *statist* / Negara.

Berkaitan dengan kondisi Indonesia yang kompleks, ternyata tidak dapat dipilih satu dari tiga strategi tersebut, tetapi ketiga strategi tersebut perlu terus dilaksanakan. Artinya, ketika pemerintah melakukan pembangunan sosial, maka peran-peran dari swasta dan sektor ketiga (masyarakat madani) terus ditumbuhkan. Sehingga tidak terjadi dominasi pemerintah dalam penanganan pembangunan sosial. Masing-masing pihak terus menunjukkan kiprahnya. Bahkan, bisa melakukan sinergi untuk mempercepat proses pembangunan sosial. Jika swasta dan sektor lain mampu memberikan kontribusi pada

Negara, maka diharapkan akan dapat mengurangi beban pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa mengalokasikannya untuk program strategis lainnya.

Hubungan teori perencanaan sosial dengan pemekaran wilayah yaitu bahwa suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh yang berdampak pada pemekaran wilayah di masyarakat tersebut. Adapun pemekaran wilayah tersebut merupakan suatu perencanaan seperti yang diungkapkan dari teori perencanaan sosial.

b. Teori Perubahan Sosial

Dalam menjelaskan fenomena perubahan sosial terdapat beberapa teori yang dapat menjadi landasan dalam memahami perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini ialah Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan kerja. Adapun tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif, menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal.

Dalam teori perubahan sosial, sudah tentu dipengaruhi oleh waktu. Teori perubahan secara lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam

interval waktu yang cukup lama dan disertai dan perubahan-perubahan dan terjadinya pergeseran sosial secara perlahan.

Hubungan teori perubahan sosial dengan pemekaran yaitu dalam proses pemekaran wilayah pasti akan mengalami suatu perubahan yang direncanakan baik dalam jangka waktu yang cepat maupun lambat seperti yang di ungkap dalam teori revolusi. Jadi menurut peneliti, teori yang digunakan ini dapat memecahkan rumusan masalah yang diangkat.

5. Penelitian Relevan

Jumriani (2017), melakukan penelitian dengan judul Dampak Pemekaran Wilayah Kec. Parigi Kab. Gowa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Sicini. Penelitian ini mengfokuskan pada dua hal yaitu: dampak pemekaran wilayah kecamatan parigi terhadap infrastruktur jalan di Desa Sicini pasca pemekaran dan respon masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak pemekaran wilayah kecamatan terhadap pemberian pelayanan infrastruktur jalan di desa sicini. Jenis penelitian bersifat kualitatif, metode pengumpulan data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur pustaka, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan tiga teori yaitu konsep desentralisasi, pembangunan dan Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan di desa sicini kecamatan parigi sangat lambat.

Beberapa masalah yang terjadi yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur menjadi lambat dan tidak berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh desa disini hanya dilakukan setahun setelah pemekaran kecamatan parigi akan tetapi setelah itu sudah tidak ada proses pemeliharaan dan perbaikan. Adapun respon yang terbentuk dimasyarakat terhadap dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa disini ialah respon moderat, respon kritis serta masyarakat yang merespon apatis.

Eko Oktah Supri Lariki (2012), melakukan penelitian dengan judul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Menurut Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Bupati Kampar bagian pemerintahan yang berjumlah 4 orang. Dari populasi tersebut penulis mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang penulis maksud disini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan penulis dalam menjelajahi objek yang diteliti. Data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan metode induktif dan deduktif.

Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah akan mempercepat proses pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan dan memutus keterisoliran penduduk yang berada di daerah pedalaman dalam menjangkau ibu kota kecamatan sehingga mempermudah diberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sebaliknya, serta mempercepat penyampaian informasi khususnya yang menyangkut program atau kebijaksanaan pemerintah daerah dan untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan. Pemekaran wilayah tersebut sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, karena dapat menjadi peluang-peluang baru untuk berusaha bagi para investor maupun bagi pengusaha kecil dan menengah. Dan selain itu masyarakat dapat dengan mudah untuk diberi arahan dan binaan melalui lembaga-lembaga tertentu guna untuk terciptanya masyarakat yang terampil dalam bidang apapun, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan apapun. Dalam perkara ini penulis juga melihat bagaimana dengan adanya pemekaran wilayah maka akan terciptanya masyarakat yang sejahterah, optimis serta memiliki kemampuan menatap masa depan yang gemilang.

Susanti (2014), melakukan penelitian dengan judul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran wilayah menurut pakar dan menurut masyarakat terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara sebagai Kabupaten induk setelah mengalami tiga kali pemekaran. Penelitian

ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan setelah pemekaran ada pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Utara yaitu dari pertanian menjadi industri pengolahan, kesejahteraan Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan. Hasil hitungan menggunakan alat AHP yaitu para pakar berpendapat bahwa dampak yang paling utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan ekonomi sementara masyarakat merasakan setelah pemekaran ternyata peningkatan kualitas infrastruktur lebih dominan daripada kesejahteraan ekonomi.

Sella Ayu Wandira (2014), melakukan penelitian dengan judul Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran dalam ketersediaan saran dan prasarana (infrastruktur) Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengetahui dampak dari pemekaran dalam pembangunan infrastruktur pada desa panampaan uken. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ditemukan informasi bahwa pembangunan infrastruktur berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, masjid sedangkan untuk infrastruktur untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti kantor kepala desa masih belum ada, dan dampak atas pemekaran desa yang terjadi sangat signifikan terlihat dari pembangunan infrastruktur, dimana masyarakat merasakan dampak yang sangat positif yaitu kemudahan dalam mengakses lokasi dan melaksanakan mobilitas.

Imam Sapi'I (2013), melakukan penelitian dengan judul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap infrastruktur. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan masyarakat setempat beserta para aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemekaran terhadap infrastruktur dalam kurun waktu sepuluh tahun, menghasilkan pembangunan jalan dengan pavingisasi, plengsengan, dan pengerasan, serta pengaspalan jalan merupakan pembangunan bidang transportasi. Dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah kesenjangan sosial di masyarakat.

B. Kerangka Konsep

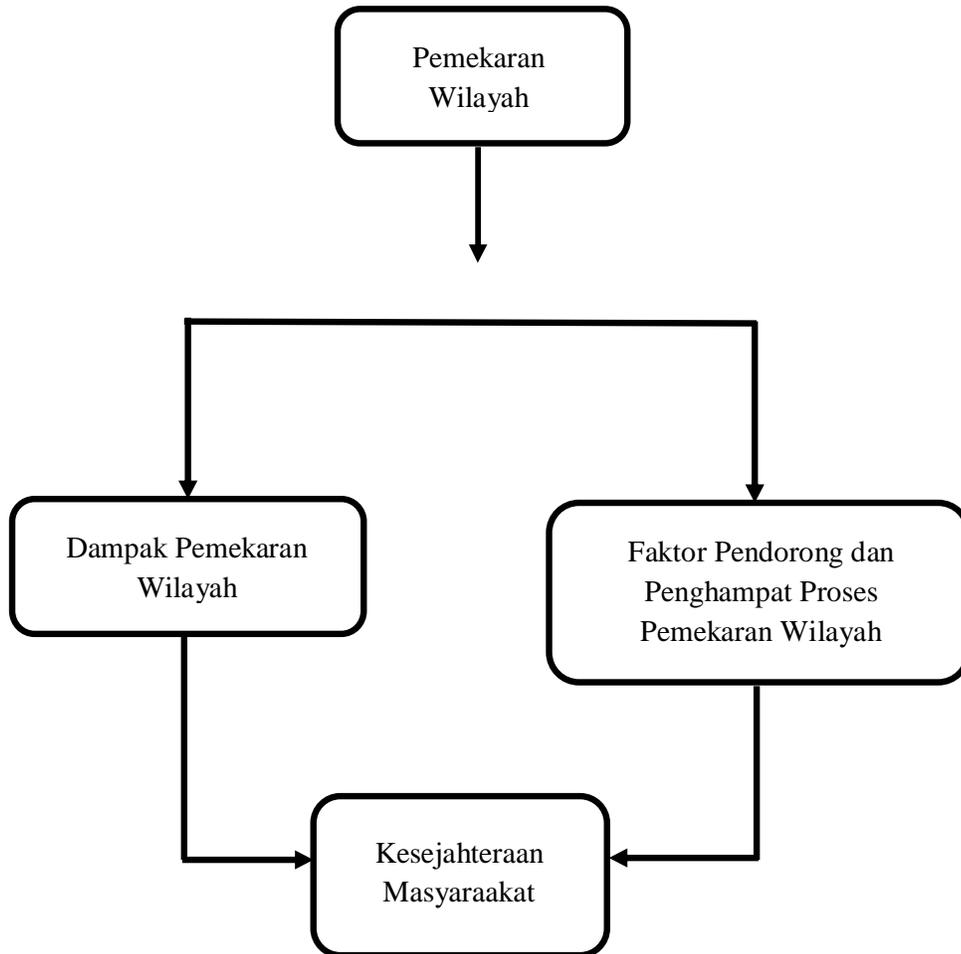
Pemekaran wilayah adalah pemecahan suatu wilayah menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayah, kondisi geografis dan pertumbuhan jumlah penduduk. Setelah pemekara tentu akan menimbulkan dampak dari pemekaran tersebut, adapun dampak yang ditimbulkan adalah sebelum dan sesudah pemekaran dengan melihat dari kedua aspek yang pertama aspek sosial yang meliputi: pendidikan, kesehatan dan sarana jalan. Kedua aspek ekonomi meliputi: jenis pekerjaan dan pendapatan. Dari kedua aspek sosial dan ekonomi yang ditunjukkan oleh masyarakat tentunya diharapkan adanya peningkatan pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita atau nilai dari suatu pembangunan serta menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dari suatu Negara. Jadi dalam pemekaran ini bertujuan sebagai alat untuk merespon proses pemerataan percepatan pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan dapat terlaksana yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan tersedianya berbagai fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembangunan sosial yang menurut Midgley, yaitu mengenai suatu proses perubahan sosial terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan secara menyeluruh dan dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi dinamis. Teori kedua yang digunakan adalah teori revolusi yang menurut Soerjono Soekanto, yaitu mengenai bentuk perubahan sosial. Perencanaan biasanya bertujuan untuk perubahan sosial yaitu perubahan yang diarahkan dan didasarkan.

Dengan demikian apabila model penelitian tersebut dalam bentuk bagan, maka akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 1 : Kerangka Konsep



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena, baik yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia yang diselidiki dari objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, teori sering kali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. Teori ini bisa jadi sempurna dengan adanya variabel-variabel, konstruk-konstruk, dan hipotesis-hipotesis penelitian. Peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum. Dalam penelitian kualitatif teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Dengan menjadikan teori sebagai poin akhir penelitian, berarti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung mulai dari data, lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. (Jhon W. Creswell, 2010:93-95)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

C. Informan Penelitian

Proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap terkait dengan apa yang kita teliti, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti.

Menentukan informan dapat dilakukan dengan cara melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal (pemerintah) maupun informal (non pemerintah pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dan saya melakukan wawancara dengan kriteria untuk sebagai berikut:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan ahli, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan biasa, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yaitu proses pemekaran wilayah ekonomi dan faktor pendorong dan penghambat proses pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karave, Kabupaten Mamuju Utara.

E. Instrument Penelitian

Instrument yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ialah berupa lembar observasi, wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar observasi, berisi catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Wawancara merupakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.
3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebagai alat pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan

menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan dan juga didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumen.

Sumber data terdiri dari sumber informan kunci, informan ahli, dan informan biasa.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik penelitian dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti khususnya pada objek dan subjek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial. Dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka penulis dapat melakukan penyampaian sejumlah pertanyaan kepihak responden secara lisan dengan menggunakan panduan wawancara, tiada lain untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis.

3. Dokumentasi

Data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan yang berkenaan dengan judul penulis dan data dari responden atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data, tiada lain untuk memperkuat *kredibilitas* data yang diperoleh.

4. Partisipatif

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Pengamatan ini mempunyai maksud bahwa pengumpulan data melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam satu lokasi, selama pengumpulan data berlangsung harus dilakukan secara sistematis tanpa menempatkan diri sebagai peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai penulis adalah analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*). Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada teknik analisis data tersebut yaitu mengumpulkan data, reduksi data, display data, dan verifikasi/menarik kesimpulan.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah-langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengumpulkan data, reduksi data, display data dan verifikasi/menarik kesimpulan. Peneliti melakukan usaha untuk memperkuat keabsahan datanya yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan ditambah waktu satu minggu lagi. Jika dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data, apabila setelah diteliti kembali dan data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Perihal dalam meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah/enteng data dan informasi.

3. Triagulasi Data

Triagulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau istilah lain dikenal dengan *trustworthinnes*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan.

J. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan ke						Ket.
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Penyusunan proposal	■						
2	Konsultasi proposal penelitian		■					
3	Seminar proposal penelitian			■				
4	Melaksanakan penelitian			■				
5	Interpretasi dan analisis data				■			
6	Penulisan laporan hasil penelitian				■			
7	Bimbingan dan konsultasi				■			
8	Seminar hasil Penelitian					■		
9	Revisi seminar hasil penelitian					■		
10	Penyajian ujian skripsi						■	

BAB IV

GAMBARAN HISTORIS DAN LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Mamuju Utara

Kabupaten Mamuju Utara adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Pasangkayu. Kabupaten ini merupakan kabupaten termuda dan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Mamuju yang terletak 719 km ke sebelah utara dari Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah kabupaten Mamuju Utara 3.043,75 km². Secara geografis, kabupaten Pasangkayu terletak pada titik koordinat antara 3°39" sampai 4°16" Lintang Selatan dan 119°53" sampai 120°27" Bujur Timur dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Donggala provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Mamuju, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

B. Deskripsi Khusus Desa Karave sebagai Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Karave

Desa Karave sebelumnya adalah merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) pada tanggal 26 Februari 1989 setelah berjalan beberapa tahun dijadikan Desa Persiapan pada tahun 1998, Tahun 2004 terjadi pergantian nama dari Baras III menjadi desa Karave sejalan kebijakan pemerintah maka terjadi perubahan status dari daerah transmigrasi menjadi wilayah otonomi dengan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Mamuju

Utara dengan jumlah penduduk ± 2500 jiwa. Tahun 2004 menjadi awal masyarakat desa Karave untuk menentukan pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka, maka pada tahun ini terjadi pemilihan Kepala Desa Karave yang pertama. Maka gejolak situasi politik pada tahun 2004 sangatlah berkejolak. Pada tanggal 11 Agustus 2004 maka dilantiklah kepala desa Karave yang pertama. Dari tahun 2004 sampai 2006 pihak pemerintahan desa Karave dalam membenahan dan menata desa sesuai dengan potensi yang ada.

Pada akhir tahun 2012 Masyarakat desa karave melaksanakan pemilihan Kepala desa yang baru secara demokrasi dan kepala Desa yang terpilih (H.SUWANTO) dilantik oleh Bupati di Desa Karave dan dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Setelah dilantik kepala desa yang baru memerkarkan dusun yaitu Tahun 2013 dari 3 Dusun menjadi 6 Dusun yaitu Dusun Lembah sari, Dusun Makarti, Dusun Telaga Sari, Dusun Jator, Dusun Buana Mukti dan Dusun Wanagiri Tahun itu juga Desa Karave mendapatkan kepercayaan yang, kedua untuk mengikuti Lomba Desa dimana pada saat itu mendapat peringkat satu tingkat Kabupaten dan sempat mewakili tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013.

Table 1: Jumlah Penduduk Desa Karave

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah
			LK	PR	JML LK/PR	
1.	Lembah Sari	106	223	210	433	± 454.125 Ha
2.	Makarti	79	185	152	337	
3.	Telaga Sari	81	168	148	316	

4.	Jator	93	165	168	333	±256.625 Ha
5.	Buana Mukti	104	208	210	418	±639.625 Ha
6.	Wanagiri	123	218	213	431	
	Total	586	1167	1101	2268	1.350,375 Ha

Sumber : Data Kantor Desa Karave

2. Letak Geografis Desa Karave

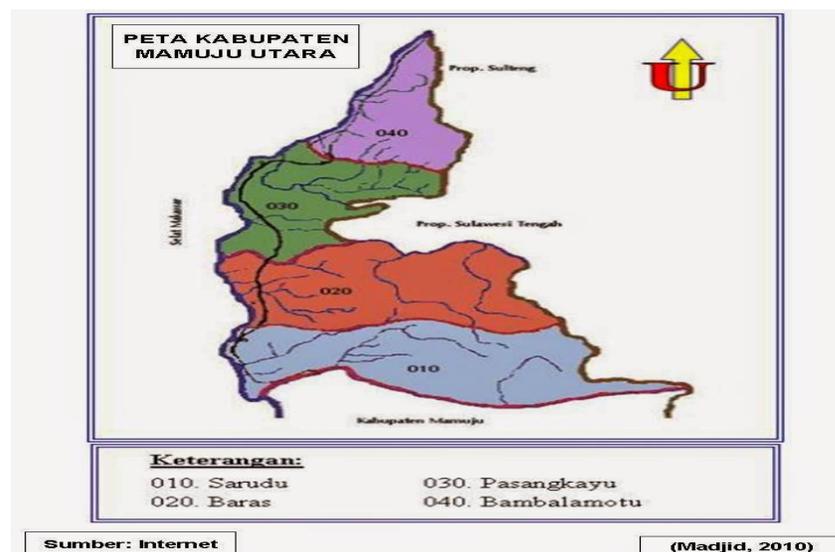
Desa Karave merupakan salah satu bagian dari kabupaten Mamuju Utara yang secara geografis terletak pada 0°50'38" LS sampai dengan 1°5'42" LS dan 119°16'45" BT sampai dengan 119°52'38" BT. Desa Karave mencakup luas ±1350 ha, yang terdiri dari tiga Dusun yaitu dusun Lembah Sari (± 454,125 ha) Dusun Telaga Sari (± 256,625 ha) dan Buana Mukti (± 639,625 ha).

Secara geografis desa karave mempunyai potensial disebabkan lokasi pertanian, perkebunan yang subur serta ditunjang dengan beberapa sungai yang mengelilingi desa Karave. Batas wilayah administrasi desa Karave sebagai berikut, terdiri dari batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan desa Lilimori, sebelah timur berbatasan desa Bukit Harapan, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Motu dan sebelah Barat berbatasan desa Bajawali. Desa Karave mempunyai luas wilayah ± 1350 ha yang terdiri dari 3 (tiga) dusun dan 19 RT/RW, Jarak dari ibu kota desa ke ibu kota Kecamatan 3 Km, Jarak antara ibu kota desa ke ibu kota Kabupaten 66 Km dan jarak antara ibu kota desa keibu kota Provinsi adalah 310 Km.

Tabel 2: Batas wilayah administratif desa karave

No.	Uraian	Keterangan
1.	Batas wilayah - Sebelah utara berbatas dengan desa - Sebelah timur berbatas dengan desa - Sebelah selatan berbatas dengan desa - Sebelah barat berbatas dengan desa	 - Lilimori - Bukit Harapan - Motu - Bajawali
2.	Luas wilayah desa RT Dusun	\pm 1350 ha. 20 6
3.	Jarak ibu kota desa ke ibu kota kecamatan	5 km
4.	Jarak ibu kota desa ke ibu kota kabupaten	66 km
5.	Jarak ibu kota desa ke ibu kota provinsi	310 km

Sumber : Data kantor Desa Karave



3. Keadaan Sosial (Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan)

Masyarakat Karave dilihat dari segi pendidikan sudah tergolong maju karena masyarakat pada umumnya sudah sadar untuk meningkatkan pendidikan anak-anak mereka bahkan bukti dari kesadaran masyarakat terdapatnya beberapa sekolah di desa mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),TK,SD,MTS (SLTP),MA (SLTA).

Masyarakat pada umumnya sudah banyak menyadari Kesehatan sangatlah lebih penting dipelihara dan dijaga agar segala aktivitas keseharian dapat terselesaikan sesuai yang kita inginkan.maka dari itu masyarakat Karave sangat memelihara kebersihan dan keselamatan demi diri mereka. Walaupun masyarakat mempunyai kemampuan yang terbatas dalam pemeliharaan dan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Keagamaan desa Karave menaungi 4 agama yaitu Islam, Hindu, Khatolik, Kristen. Walaupun masyarakat menganuk agama yang berbeda tapi tetap jaga kerukunan dan menjunjung kebersamaan dan persatuan berdasarkan saling menghargai dan menghormati disetiap penganut-penganutnya. Bukti dari kerukunan ummat beragama adalah berdirinya Pesantren dalam satu kompleks dengan Gereja, dimana disini kita dapat melihat bahwa toleransi ummat beragama masih kuat ini semua hanya didasari dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Masyarakat desa Karave sudah sebagian besar menyadari perlunya membangun kebersamaan, kerja gotong royong dan hidup secara kelompok untuk merencanakan program dan berpartisipasi dalam kegiatan

kemasyarakatan, Kondisi social budaya masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat Desa Karave cenderung masih kuatnya budaya paternalistic. Meskipun demikian tingkat partisipasi masyarakat dalam memikirkan masa depan desa cukup tinggi ini dibuktikan dengan besarnya peranserta masyarakat dalam proses penyusunan RPJM-Desa.

Munculnya masalah kemiskinan sangat kontras dengan potensi yang dimiliki desa, ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan dan ketertinggalan lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk setiap tahun sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi secara merata. Penyebab lainnya adalah kurangnya kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil-hasil pembangunan karena keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan akses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

4. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Karave umumnya bermata pencaharian tani seperti Sawit, kakao, jagung dan Kelapa dalam, sebagian berternak Sapi, Kambing, Ayam dan Ikan, serta banyak yang membuka Usaha-usaha kecil misalnya Kerajinan pembuatan Batu Bata, Pandai besi, pembuatan Tempe-Tahu, Menjahit, Tenung dan masih adakerajinan-kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Karave, tetapi mereka terhambat oleh pendanaan/modal yang selama ini mereka alami.

Masyarakat desa Karave sesungguhnya mempunyai potensi baik dar isegi Alam maupun Manusianya namun mereka masih sangat membutuhkan

sentuhan/bantuan dari pihak pemerintah agar kebutuhan mereka bias terpenuhi. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sangat perlu di perhatikan oleh pemerintah agar kondisi kemiskinan dan ketertinggalan dapat menurun.

Table 3: keadaan ekonomi berdasarkan pekerjaan

No.	Mata Pencarian	Jumlah
01.	Tani	601
02.	Wiraswasta	84
03.	Jasa	56
04.	PNS	14

Sumber: Data kantor Desa Karave

5. Potensi

Potensi Unggulan yang ada di desa Karave ada dua macam yang mendukung adalah salah satu dari segi Sumber Daya Alam meliputi berbagai macam jenis diantaranya dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya dan dua dari segi Sumber Daya Manusia meliputi pemerintah dan masyarakat yang memiliki kemampuan bekerja serta keterampilan yang dimiliki oleh mereka. Luas tanah pemukiman (kering) ±225 ha, tanah basah ±50 ha dan Tanah Perkebunan sekitar±940 ha.

a. Bidang pertanian

Dalam bidang pertanian desa karave sangat berpotensi dilihat dari segi kondisi alam yang sangat mendukung serta SDA yang tersedia .pertanian di desa karave terdiri dari beberapa jenis tanaman yang di tanam oleh masyarakat dan mempunyai hasil yang memuaskan karena kondisi lahan dan iklim yang

mendukung dimana di desa ini mempunyai sungai yang dapat mengalir tanaman petani antaranya tanaman sawit yang menjadi unggulan serta penghasilan yang sangat membantu masyarakat yang terdiri dari 1053 ha dengan penghasilan 3 ton/ha, Kakao yang mempunyai luas Lahan 123 ha dengan penghasilan 2 ton/ha, Kelapa Dalam sekitar 50 ha dengan penghasilan 4 ton/ha, Jeruk dengan luas 5 ha dengan hasil 2 ton/ha, Alpokat luas 1 ha dengan hasil 2 ton/ha, Mangga luas 1 ha dengan hasil 2 ton/ha, Rambutan luas 5 ha dengan hasil 2 ton/ha, Salak luas 1 ha dengan hasil 3 ton/ha, Pepaya luas 1 ha dengan hasil 2 ton/ha, Durian luas 4 ha dengan hasil 3 ton/ha, Nenas 3 ha dengan hasil 3 ton/ha dan pisang luas 4 ha dengan hasil 2 ton/ha.

Table 4: bidang pertanian berdasarkan jenis tanaman

No.	JenisTanaman	Luas(ha)	Hasil (ton/ha)
01.	Sawit	1053	3
02	Kakao	123	2
03	Kelapa Dalam	50	4
04	Jeruk	5	2
05	Alpokat	1	2
06	Mangga	1	2
07	Rambutan	5	2
08	Salak	1	3
09	Pepaya	1	2
10	Durian	4	3

11	Nenas	3	3
12	Pisang	4	4

Sumber: Data kantor Desa Karave

b. Bidang peternakan

Dalam bidang peternakan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat yang terdiri dari ternak, ayam sekitar 8505 ekor, kambing 300 ekor, sapi sekitar 70 ekor, ikan 500 ekor, babi yang berjumlah sekitar 325 ekor, dimana ternak tersebut sangat membantu penghasilan masyarakat dalam kebutuhan sehari-harinya dengan harga yang memuaskan. Ternak tersebut dalam hal pemasaran sangatlah mudah disamping lokal adapun dari luar desa yang datang mencari.

Table 5: bidang peternakan berdasarkan jenis ternak

No.	JenisTernak	JumlahEkor
01.	Ayam	8505
02	Kambing	300
03	Sapi	70
04	Ikan	500
05	Babi	325

Sumber: Data kantor Desa Karave

c. Bidang pendidikan

Tingkat Pendidikan yang ada di desa Karave masih kurang dimana terdiri dari SD berjumlah 1595 orang, SLTP 471 orang, SLTA 492 orang, DI/II 20 orang, SI 12 orang.

Tabel 6 : Dalam Bidang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
01.	SD	1595
02	SLTP	471
03	SLTA	492
04	DI/II	20
05	SI	25

Sumber : Data kantor Desa Karave

d. Bidang industri kecil

Bidang Usaha Industri kecil ini sangat mendukung dalam perekonomian di desa disebabkan banyaknya masyarakat yang mempunyai potensi atau keterampilan dalam berbagai macam jenis usaha industri kecil antara lain bengkel dengan jumlah 10 unit, tenun 2 kelompok, jahit/sulam 4 kelompok, tahu/Tempe 2 kelompok, pandai besi 4 kelompok, batu bata 2 kelompok, pedagang kaki lima 15 kelompok.

Tabel 7: bidang industri usaha kecil berdasarkan jenisnya

No.	Jenis Usaha	Jumlah
01.	Bengkel	10
02	Tenun	2
03	Jahit/sulam	4
04	Tahu-Tempe	2
05	PandaiBesi	4
06	Batu Bata	2
07	Pedagang kaki lima	15

Sumber: Data kantor Desa Karave

6. Struktur Organisasi Desa Karave

Struktur Organisasi Desa Karave Terdiri dari kepala desa Kaur-kaur, Kepala dusun, ketua – ketua RT/RW, serta ketua BPD dan Para Anggota-anggotanya. Pemerintahan desa dan BPD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Desa berfungsi untuk mengelola Rumah Tangga desa serta dibantu oleh beberapa staf.
- b. Sekretaris Desa berfungsi untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi, mengatur tentang persuratan dan membantu dalam pemilihan kepala dusun dan ketua-ketua RT/RW.
- c. Bendahara Desa berfungsi untuk membantu kepala desa dalam mengatur keuangan dan mengetahui masuk keluarnya dana yang digunakan oleh desa.
- d. Kaur Pembangunan berfungsi untuk mengatur pembangunan yang ada di desa.
- e. Kaur Kesra berfungsi untuk mengontrol segala kegiatan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
- f. Kaur Umum berfungsi untuk mengontrol segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh desa antaranya keluar masuk surat.
- g. Kaur Pemerintahan berfungsi untuk mengatur pemerintahan yang ada di desa.
- h. Ketua BPD beserta anggota fungsinya adalah Memusyawahkan segala rencana-rencana pembangunan desa serta mengawasi pembangunan yang ada dalam desa. BPD juga mempunyai fungsi dalam lembaga Pemilihan Kepala Desa.

7. Sistem Kebudayaan

Mamuju utara merupakan daerah yang sangat kaya akan budaya dan keberagaman etnis. Salah satunya budaya yang ada di desa karave kecamatan bulu taba kabupaten mamuju utara yakni adat To' Ribara.

Dalam artian dalam masyarakat adat adalah sebagai komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideology ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Masyarakat masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya. Sebagaimana juga adat To' Ribara yang ada di desa karave ini berasal dari leluhur turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyangnya ke turunannya.

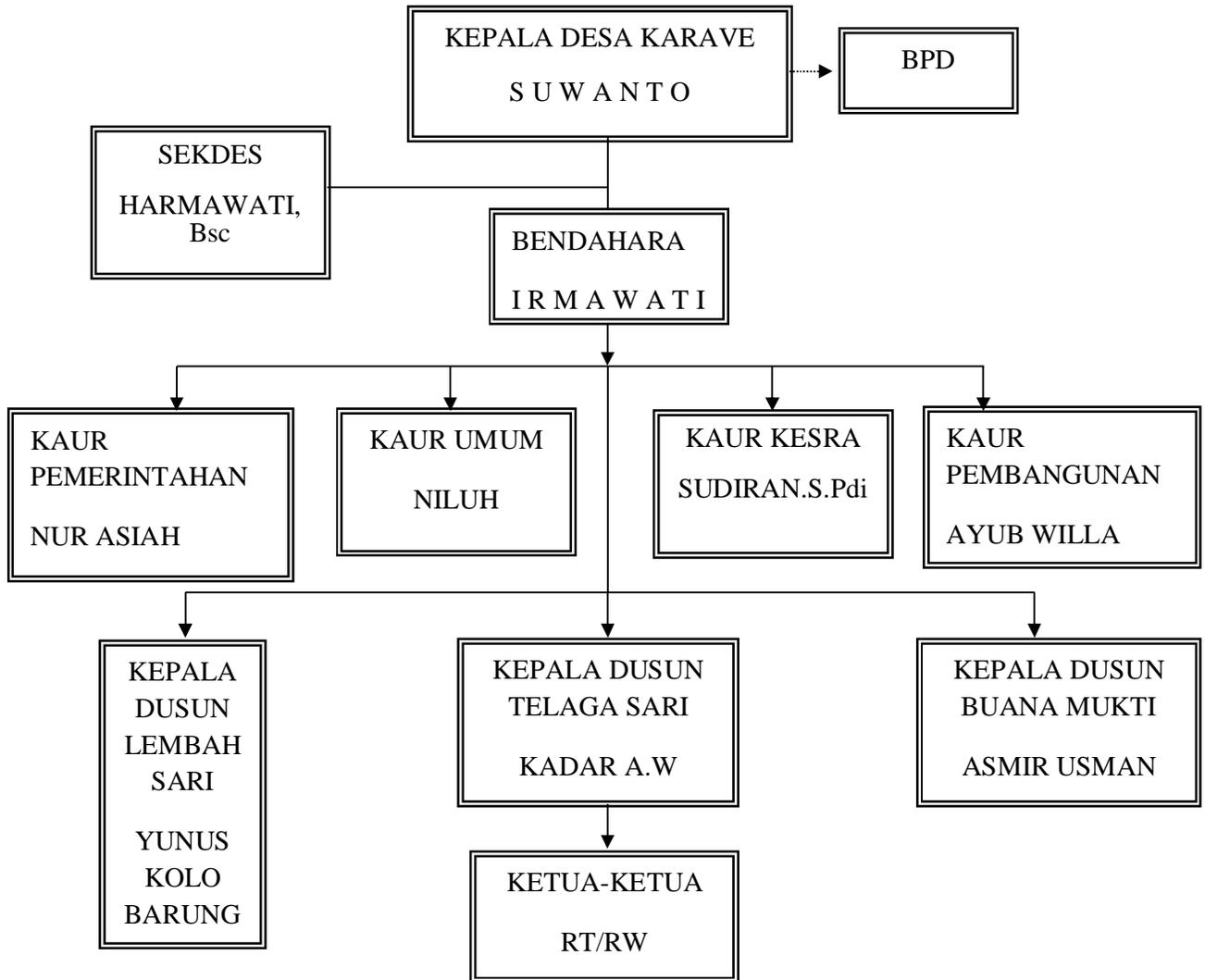
Berdasarkan sejarah perkembangannya, adat To' Ribara awalnya berkembang di desa karave, kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Tokoh adat To' Ribala di desa karave menambahkan bahwa upacara adat To' Ribara di desa karave ini adalah upaya mempererat tali silaturahmi keluarga besar desa karave dan berlangsung selama 3 hari demikian juga pada puncaknya acara ini ditandai dengan pemotongan hewan kurban yang merupakan simbolisasi upacara terima kasih kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa yang telah mewariskan bumi serta isinya kepada anak cucu.

Keberagaman suku dan adat istiadat merupakan bagian dari khasanah budaya Indonesia yang harus kita lestarikan.ditengah perkembangan zaman

dan nilai-nilai budaya yang semakin luntur, namun masih ada tokoh adat To' Ribara yang ingin terus melestariakan kebudayaan nenek moyangnya.

Gambar 2: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karave Kecamatan

Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara



Sumber: Data kantor Desa Karave

BAB V

IMPLIKASI SOSIAL PEMEKARAN WILAYAH

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian mengenai implikasi sosial pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari aspek ekonomi di Desa Karave Kabupaten Mamuju menunjukkan suatu gambaran pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang baik, hal ini dapat dilihat dari indikator ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yang meningkat karena secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbandingan ketersediaan sarana ekonomi dari sebelum dan setelah pemekaran mengalami perubahan yang pesat dikarenakan jumlah pembangunan menjadi sangat banyak dan jauh berkembang.

Indikator sosial yang dapat dilihat dari sarana pendidikan yaitu adanya peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar disemua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebab dengan faktor pendidikan ini dapat menentukan setiap tindakannya terutama dalam mengelola setiap kegiatan usaha, misalnya cepat menerima informasi pada berbagai sektor kegiatan usaha yang berasal dari berbagai sumber informasi, baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

Sarana kesehatan, menunjukkan hal yang baik pula dimana pembangunan kesehatan dititik beratkan pada peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, dimana semakin baik tingkat kesehatan seseorang maka hal ini cenderung akan lebih meningkatkan produktifitas seseorang yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraannya. Selanjutnya sarana jalan telah memiliki sarana jalan yang baik pula dimana ditunjukkan dengan meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang mana akan menuntun peningkatan pembangunan seperti jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu desa ke desa lainnya.

Demikian pada indikator ekonomi dapat dilihat dari segi jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat dimana bahwa masyarakat telah memiliki pekerjaan profesional sehingga sumber pendapatan mereka tersebut mampu meningkatkan perekonomiannya. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa dan masyarakat dalam menjalankan tata kelola desa untuk lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan pembangunan desa seperti tersedianya dan terjangkaunya sarana sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk menunjang aktivitas hidupnya.

Pada pembahasan implikasi sosial pemekaran desa ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai implikasi sosial pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karave. Hal ini penting karena untuk memperbaiki keadaan atau kehidupan masyarakat dimasa mendatang. implikasi pemekaran desa adalah pengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat seperti meningkatkan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana jalan, jenis pekerjaan, dan pendapatan. Oleh karena itu, implikasi sosial pemekaran desa sangat penting dalam meningkatkan pembangunan, karena dengan pemekaran disini dapat berdampak positif terhadap

pengembangan suatu desa. Adapun dampak pemekaran desa dengan pengaruh yang kuat dapat menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana pendidikan. Maksudnya dengan pemekaran desa diharapkan dapat menciptakan suatu peningkatan pendidikan dan perluasan wajib belajar mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
2. Meningkatkan sarana kesehatan. Maksudnya dengan pemekaran desa diharapkan adanya tambahan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang tingkat kesehatan masyarakat seperti tersedianya gudang kesehatan yang dapat memungkinkan meningkatnya mutu pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, karena salah satu alasan pemekaran adalah pelayanan dan dengan pemekaran ini masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.
3. Meningkatkan sarana jalan. Maksudnya adalah dengan pemekaran desa diharapkan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang akan menuntun pada peningkatan pembangunan.
4. Jenis pekerjaan yang dimaksudkan adalah jenis pekerjaan utama (pokok) dan pekerjaan sampingan yang digeluti oleh masyarakat di Desa Karave sebagai sumber kehidupan atau sumber pendapatan.

Untuk menjelaskan maksud tersebut, maka harus diketahui seberapa besar dampak partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dalam proses pembangunan di Desa Karave.

1. Meningkatkan Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan suatu kondisi dimana pembangunan pendidikan di Desa dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar

di semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, dan diharapkan agar dapat memperoleh kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Sebelum pemekaran Desa Karave pembangunan pendidikan yang ada di desa boleh dikatakan masih terbatas, namun setelah pemekaran pembangunan pendidikan sudah berkembang dengan baik misalnya pembangunan tingkat pendidikan yang mana sebelumnya hanya terdapat satu sekolah saja sekarang menjadi dua sekolah.

Dengan adanya pemekaran di Desa Karave dapat meningkatkan sarana pendidikan sehingga dengan kondisi demikian, menyatakan bahwa pemekaran sangat berdampak positif terhadap sarana pendidikan. Dikarenakan sebelum Desa Karave mekar sarana pendidikan masih terbatas. Hal ini diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Karave, menyatakan bahwa:

“Pemekaran Desa sarana untuk melakukan peningkatan pendidikan. Dilakukannya pemekaran ini merupakan langkah tepat untuk meningkatkan sarana pendidikan di wilayah Desa, dimana setelah pemekaran terjadi, sudah terdapat adanya penambahan tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak, karena apa yang telah direncanakan telah sesuai dengan apa yang diinginkan dan masyarakat pun dapat menikmati pendidikan yang sudah ada di Desa tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Suwanto, tanggal 19 juli 2018)

2. Meningkatkan Sarana Kesehatan

Meningkatkan sarana kesehatan merupakan salah satu perwujudan usaha mencapai keadilan sosial dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi

setiap warga untuk mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan pembangunan serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pemekaran Desa dapat meningkatkan sarana kesehatan masyarakat disamping sarana kesehatan yang telah tersedia sudah semakin dekat dan dapat dijangkau sehingga masyarakat yang berada di Desa Karave tidak perlu jauh-jauh pergi ke Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan. Dengan adanya pemekaran desa tersebut sangat berdampak positif untuk kesehatan masyarakat.

Hal ini didukung oleh pernyataan sekertaris Desa megatakan bahwa:

“Pemekaran Desa Karave, berdampak pada peningkatan sarana kesehatan masyarakat, artinya bahwa pemekaran desa sangat berdampak baik pada kesehatan masyarakat, karena pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Bidan tersebut tidak hanya melayani di Pos Kesehatan Desa saja tetapi juga dilakukan di rumah masyarakat yang membutuhkan”.
(Wawancara dengan Ibu Harmawati, tanggal 20 juli 2018)

Berdasarkan data diatas penulis dapat menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran desa dapat meningkatkan sarana kesehatan masyarakat, artinya disamping jaraknya sudah semakin dekat dengan rumah warga, pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat baik karena pelayanannya bukan saja berdasarkan pada hubungan formal tetapi juga hubungan informal, sehingga masyarakat merasa puas dilayani. Sebelum pemekaran dilakukan sarana kesehatan yang ada di Desa boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Namun dengan pemekaran ini, dapat memberikan pelayanan tersendiri untuk masyarakat Desa Karave tentang kemandirian dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan yang ada di

Desa Karave dan dengan pemekaran ini, maka Desa Karave sudah dapat melakukan pemeriksaan di Desa sendiri tanpa harus pergi ke Desa lain.

3. Meningkatkan Sarana Jalan

Sarana jalan juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, karena selain akses jalan digunakan sebagai transportasi untuk menghubungkan desa satu ke desa lainnya juga untuk mendukung aktivitas masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yaitu dengan cara membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sarana pembangunan nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah antar di wilayah tersebut. Sehingga jalan dapat dikatakan sebagai akses penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, sebab apabila sarana jalan yang tidak memadai menyebabkan kegiatan transportasi masyarakat terhambat. Dimana hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemekaran desa dapat meningkatkan sarana jalan karena akses perekonomian masyarakat dari desa satu ke desa lainnya menjadi lancar. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Setelah pemekaran peningkatan sarana jalan di Desa Karave dapat dikatakan cukup membantu walaupun tidak semua jalan teraspal, tetapi masyarakat merasa cukup terbantu dalam hali ini melakukan akses perekonomian ke desa lainnya, walaupun sepenuhnya belum terlaksana namun ada kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat karena apa yang masyarakat inginkan dan butuhkan telah diberikan oleh pemerintah”.
(Wawancara Oleh bapak Suwanto, tanggal 19 juli 2018)

4. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan pokok dan sampingan yang digeluti oleh masyarakat sehingga dari pekerjaan tersebut dapat menambah

penghasilan dari segi ekonomi masyarakat yang menyebabkan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan memanfaatkan melalui penggunaan potensi-potensi yang ada di desa dengan semaksimal karena dari jenis pekerjaan tersebut akan mempengaruhi kondisi perekonomian mereka. Sehingga dari hasil tersebut dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Sebagian besar masyarakat desa Karave mengatakan bahwa pemekaran desa memberikan dampak dalam peningkatan jenis pekerjaan. Karena potensi-potensi yang ada di desa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala desa yang mengatakan bahwa:

“Pemekaran Desa Karave cukup bermanfaat untuk peningkatan jenis pekerjaan, karena salah satu faktor penyemangat masyarakat untuk melakukan pemekaran adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa untuk memenuhi kebutuhan, seperti potensi yang ada di darat yang diharapkan nantinya menjadi sektor andalan pendapatan masyarakat Desa Karave”. (Wawancara dengan bapak Suwanto, tanggal 19 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemekaran desa cukup berdampak pada peningkatan jenis pekerjaan, karena setelah pemekaran dilakukan masyarakat Desa Karave telah memanfaatkan segala potensi yang dimiliki meski belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun senada yang diungkapkan oleh bapak Makmur mengenai implikasi sosial pemekaran wilayah, yaitu:

”kalau mengenai dampaknya sangat baik bagi masyarakat desa karena melancarkan aktifitas masyarakat dalam bekerja, mengenai dengan pelayanan desa sudah efektif kepada masyarakat, dari aspek sosialnya sudah

mengalami peningkatan, begitupun dengan infrastrukturnya mengalami peningkatan yang sangat memadai, sehingga implikasi sosial pemekaran wilayah ini berdampak sangat positif bagi masyarakat desa". (Wawancara dengan bapak Makmur, tanggal 17 juli 2018)

B. Penjabaran Hasil Penelitian

Pembangunan pemekaran wilayah yang berada di Desa Karave sementara dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Midgley yang mengatakan bahwa suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi dinamis.

Hal ini terlihat pembangunan yang berada di daerah tersebut berdampak positif bagi perkembangan di Desa Karave baik dari segi aspek sosial dan ekonomi. Semenjak pemekaran wilayah tersebut dilaksanakan perkembangan masyarakatnya dari aspek sosialnya yaitu dari segi pendidikannya meningkat karena beberapa tahun yang lalu sebelum pemekaran tersebut dilaksanakan fasilitas pendidikannya belum memadai, dikarenakan jumlah siswa tidak sesuai luas bangunan sekolah. Dari segi kesehatan, dengan adanya pemekaran Desa dapat meningkatkan sarana kesehatan masyarakat disamping sarana kesehatan yang telah tersedia sudah semakin dekat dan dapat dijangkau sehingga masyarakat yang berada di Desa Karave tidak perlu jauh-jauh pergi ke Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan. Dengan adanya pemekaran desa tersebut sangat berdampak positif untuk kesehatan masyarakat.

Dari aspek ekonomi yang awalnya bagi petani yang mengalami kendala dalam proses pengiriman barang-barang hasil pertaniannya dikarenakan jalan yang dilalui masih sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengangkutan barang, sehingga pendapatan masyarakat belum mengalami peningkatan. Namun setelah pemekaran wilayah tersebut dilaksanakan perbaikan jalan telah dilakukan sehingga proses pengangkutan barang hasil pertanian telah lancar dan pendapatan masyarakat pun mengalami peningkatan.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Eko Oktah Supri Lariki, melakukan penelitian dengan judul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat yang dimana memperoleh hasil bahwa Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah akan mempercepat proses pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan dan memutus keterisoliran penduduk yang berada di daerah pedalaman dalam menjangkau ibu kota kecamatan sehingga mempermudah diberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sebaliknya, serta mempercepat penyampaian informasi khususnya yang menyangkut program atau kebijaksanaan pemerintah daerah dan untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan. Pemekaran wilayah tersebut sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, karena dapat menjadi peluang-peluang baru untuk berusaha bagi para investor maupun bagi pengusaha kecil dan menengah. Dan selain itu masyarakat dapat dengan mudah untuk diberi arahan dan binaan melalui lembaga-lembaga tertentu guna untuk terciptanya masyarakat yang terampil dalam bidang apapun, terutama bagi masyarakat yang tidak

mempunyai keahlian dan keterampilan apapun. Dalam perkara ini penulis juga melihat bagaimana dengan adanya pemekaran wilayah maka akan terciptanya masyarakat yang sejahterah, optimis serta memiliki kemampuan menatap masa depan yang gemilang.

Pemekaran wilayah yang merupakan proses dalam pembangunan ekonomi merupakan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan aktivitas sosial lainnya sehingga dalam hal tersebut infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.

Pemekaran wilayah tersebut suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah yang tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah tersebut. Pembangunan ekonomi dalam proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi suatu daerah. Artinya, ada tidaknya pembangunan daerah tersebut pada suatu tahun tertentu perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dari berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti, perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Pemekaran wilayah sebagai aspek dari penataan daerah, menurut Michael A. Trueblood dan Beth Walter Honadle, merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintah daerah yang terdiri dari empat bentuk, yaitu : (1) Aneksasi (*anectation*) yaitu memperluas wilayah perbatasan daerahnya dengan memasukkan wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam wilayah yang ditangani. (2) Penggabungan (*consolidation/amalgamation*) yaitu penggabungan anatar dua atau lebih pemerintahan daerah yang berdampingan dan membentuk menjadi suatu pemerintahan daerah. (3) Pemekaran (*fragmentation*) yaitu pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih pemerintahan daerah. (4) Pelepasan (*detachment*) yaitu penataan ulang terhadap perbatasan wilayah dengan melepaskan beberapa bagian wilayah dari wilayah yang dilingkupinya

Pemekaran wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pembentukan daerah pemerintah dapat dilakukan dalam dua tipe atau bentuk, yakni berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran daerah menjadi dua daerah atau lebih.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Seperti yang diuraikan diatas mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat penulis menguraikan hasil observasi dan wawancara penulis dengan para subjeknya sebagai berikut:

No	Informan	Wawancara	Interpretasi	Teori
1	SUWANTO	<p>Pemekaran Desa sarana untuk melakukan peningkatan pendidikan. Dilakukannya pemekaran ini merupakan langkah tepat untuk meningkatkan sarana pendidikan di wilayah Desa, dimana setelah pemekaran terjadi, sudah terdapat penambahan tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak, apa yang telah direncanakan telah sesuai dengan apa yang diinginkan dan masyarakat pun dapat menikmati pendidikan yang sudah ada di Desa tersebut.</p>	<p>Jadi kesimpulannya adalah pemekaran desa ini memberikan dampak yang positif karena dapat meningkatkan sarana yang ada di dalamnya terutama dalam meningkatkan sarana pendidikan. Karena semenjak adanya pemekaran pendidikan yang ada di desa meningkat.</p>	<p>Pembangunan sosial</p>
2	HARMAWATI	<p>Pemekaran Desa Karave, berdampak pada peningkatan sarana kesehatan masyarakat, artinya bahwa pemekaran desa sangat</p>	<p>Dengan adanya pemekaran desa sangat meningkatkan</p>	<p>Pembangunan sosial</p>

		berdampak baik pada kesehatan masyarakat, karena pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Bidan tersebut tidak hanya melayani di Pos Kesehatan Desa saja tetapi juga dilakukan di rumah masyarakat yang membutuhkan.	kesejahteraan masyarakat terutama pada sarana kesehatannya	
3	SUWANTO	Setelah pemekaran peningkatan sarana jalan di Desa Karave dapat dikatakan cukup membantu walaupun tidak semua jalan teraspal, tetapi masyarakat merasa cukup terbantu dalam hal ini melakukan akses perekonomian ke desa lainnya, walaupun sepenuhnya belum terlaksana namun ada kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat karena apa yang masyarakat inginkan dan butuhkan telah diberikan oleh	Dengan pemekaran desa ini maka infrastrukturnya pun meningkat. Sarana jalan telah diperbaiki sehingga dengan perbaikan jalan tersebut dapat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitasnya seperti halnya	Pembangunan sosial

		pemerintah.	melakukan akses perekonomian ke desa lainnya.	
4	SUWANTO	Pemekaran Desa Karave cukup bermanfaat untuk peningkatan jenis pekerjaan, karena salah satu faktor penyemangat masyarakat untuk melakukan pemekaran adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa untuk memenuhi kebutuhan, seperti potensi yang ada di darat yang diharapkan nantinya menjadi sektor andalan pendapatan masyarakat Desa Karave.	Kesejahteraan masyarakat pun meningkat pasca dilakukannya pemekaran karena banyaknya peluang untuk melakukan pekerjaan. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	Pembangunan Sosial

Melihat hasil interpretasi tersebut memberikan bukti bahwa dengan adanya pemekaran wilayah memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat karena mulai dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana jalan dan jenis pekerjaan pun meningkat. Dengan pembangunan infrastrukturnya dapat

memberikan peluang kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian sehingga kesejahteraan pun meningkat juga.

Berdasarkan dari berbagai implementasi dan hasil penelitian bahwa dengan adanya pemekaran desa, sistem pemerintahan yang ada di desa pun meningkat dan juga pelayanannya pun semakin baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat pun lebih baik dari sebelumnya.

BAB VI

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

PEMEKARAN WILAYAH

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Pendorong Pemekaran

Pemekaran desa adalah pembentukan desa baru dengan cara, mengembangkannya dari desa yang telah ada. Pemekaran desa karave ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di tinjau dari luas wilayah pembentukan desa karave yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pedoman pemekaran desa. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat tentu akan menghambat keinginan atau aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran. Guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, serta percepatan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa.

Dalam hal pemekaran desa karave ini pemerintah sangat mendukung. Pemerintah sebagai unsur pelayanan publik memberikan fasilitas-fasilitas, guna lancarnya proses pemekaran. Dalam hal pemekaran desa tentu adanya faktor pendorong dan penghambat dalam proses pemekaran. Adapun hasil wawancara dari narasumber yaitu sebagai berikut:

“Pemekaran dilakukan karena adanya rentang kendali di daerah, terus kemudian dengan adanya pemekaran tentu kita mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja”(wawancara dengan Makmur, tanggal 17 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita bisa melihat bahwa pemekaran dilakukan karena adanya rentang kendali yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi adapun faktor pendorong terjadinya pemekaran wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya unsur-unsur syarat pemekaran wilayah berupa luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, keragaman sosial budaya, sarana dan prasarana untuk membentuk wilayah administratif baru hasil dari pemekaran wilayah. Berikut hasil wawancara yang dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

“ Untuk memekarkan suatu wilayah maka adanya syarat yang harus dipenuhi oleh daerah tersebut apakah layak tidaknya. Sehingga dengan adanya pemekaran kita akan melihat bagaimana dampak kedepannya kepada masyarakat, maksudnya disini apakah kesejahteraan masyarakat akan meningkat” (wawancara dengan Suwanto, tanggal 19 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa untuk melakukan pemekaran harus adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi.

- b. Derasnya aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pemekaran wilayah berupa pembentukan desa karave yang diyakini akan semakin mempermudah pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini dituturkan oleh narasumber yang mengatakan bahwa:

“Pemekaran ini menjadi cerminan masyarakat daerah di desa kami. Pembangunan di desa karave sudah semakin maju karena masyarakat

juga yang turut aktif. Contohnya pada PLN akan dimasukkan di desa ini, awalnya terkendala oleh kelapa sawit masyarakat, setelah itu masyarakat setuju untuk melakukan penebangan kelapa sawit tersebut untuk dipasangkan tiang listrik” (wawancara dengan bapak suwanto, tanggal 19 juli 2018)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa desa yang telah dimekarkan ini telah menjadi contoh kepada daerah-daerah lain untuk lebih meningkatkan pembangunan daerahnya.

- c. Aparat pemerintah, mulai dari pemerintahan desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten memiliki antusiasme dan pandangan yang sama terkait upaya peningkatan kualitas daerah khususnya di tingkat desa. Berikut wawancara oleh narasumber yang mengatakan bahwa:

“Aparat pemerintah setelah terjadinya pemekaran sudah transparan dan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan terkait pengurusan-pengurusan di pemerintahan. (wawancara dengan Ibu Rosmala, tanggal 20 juli 2018)

Dari hasil penelitian yang dijelaskan oleh narasumber diatas, saya dapat memahami bahwa dengan adanya pemekaran ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terkait pengurusan karena aparat pemerintah telah memiliki sikap antusiasme dalam meningkatkan kualitas daerah terkhusus di daerahnya tersebut.

- d. Terciptanya suasana kondusif selama proses pemekaran wilayah yang ditandai dengan tidak adanya masalah yang mengandung unsur perpecahan seperti demonstrasi dan penolakan terhadap upaya pembentukan desa karave. Hal ini dipaparkan oleh narasumber, menyatakan bahwa:

“saya setuju dengan pemekaran ini karena tercipta suasana yang teratur dan tidak ada konflik yang timbul. Mereka semua setuju untuk kemajuan

desa yang lebih baik". (wawancara dengan bapak Makmur, tanggal 17 juli 2018)

Berdasarkan pengamatan saya mengenai wawancara diatas terkait dengan pemekaran bahwa dengan adanya pemekaran tercipta suasana kondusif masyarakat yang berada di daerah tersebut setuju dengan program pemerintah dalam mengembangkan wilayah karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan tambahan juga diberikan oleh bapak Makmur yang menjelaskan bahwa:

"Desa diberi peranan yang sangat besar terhadap pembangunan karena Desa dianggap itulah paling dekat dengan masyarakat. Di mana Desa supaya dia berdaya diberikan anggaran yang cukup oleh pemerintah langsung ke Desa dikelola langsung oleh Desa dan direncanakan oleh Desa dan dinikmati sendiri oleh Masyarakat Desa". (wawancara dengan bapak Makmur, tanggal 17 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari responden peneliti dapat mengetahui bahwa di Desa tersebut diberikan peranan oleh pemerintah untuk mengelola anggaran untuk pembangunan Desanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor Penghambat Pemekaran

Pemekaran wilayah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mengsinergikan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada suatu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk

mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk pemekaran wilayah tidak bisa disinergiskan. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemekaran yang dilakukan secara sistematis dan sering melengkapi. Pemekaran bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemekaran harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang mengatakan bahwa:

“Keterbatasan sumber daya manusia, aparatur dalam arti kata ketersediaan pegawai di Desa pasti terbatas, untuk mengelola pemerintahan Desa itu juga aparat Desa juga banyak yang tidak mampu untuk melaksanakan pemerintahan ini terutama mengelola dana yang cukup besar”. (Wawancara dengan bapak Makmur, tanggal 17 juli 2018)

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia aparat desa disitu mengalami kendala dalam proses pengelolaan dana, karena di dalam proses tersebut dibutuhkan keahlian dalam pengelolaan tersebut.

Program pemekaran juga memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya dan ketidakberhasilan sasaran untuk mencapai tujuan, namun harus diakui juga bahwa ada banyak yang berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Penghambat atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses pemekaran dapat berasal dari kepribadian individu dalam masyarakat dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Kendala-kendal tersebut adalah:

1. Adanya unsur politis yang sempat mengganggu proses pemekaran wilayah mengingat pemekaran wilayah identik dengan pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Maksudnya adanya pihak

pemerintah yang melakukan tindakan yang mengganggu kinerja terjadinya pemekaran. Karena masing-masing pihak ingin untung dalam hal ini.

2. Adanya tarik ulur kepentingan antara pihak yang ingin memisahkan diri dari wilayah induk untuk membentuk wilayah baru. Maksudnya tidak adanya kejelasan mengenai pihak yang berperan dalam pemekaran ini, mereka masih mengatur permasalahan ini.
3. Pembahasan di pemerintah yang terlalu lama membuat masyarakat sempat pesimis akan upaya pemekaran wilayah yang berdampak pada ketidakpercayaan publik pada aparat pemerintah. Maksudnya akibat pemekaran ini masyarakat jadi takut akan adanya pemekaran ini, karena mereka berfikir akan menimbulkan dampak nantinya.

Hal tersebut juga di perkuat oleh Narasumber yang mengatakan bahwa:

“Memang ada kendala yang dihadapi seperti adanya pihak yang ingin untung dalam hal ini sehingga adanya tarik ulur pemerintah, namun dengan adanya kendala tersebut pemerintah pun dapat mengatasi hal tersebut, sehingga pemekaranpun terlaksana dan masyarakat pun dapat menikmati hasil dari pemekaran, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
(Wawancara dengan bapak Makmur, tanggal 17 juli 2018)

Dari hasil wawancara diatas mengenai faktor penghambat pemekaran bahwa kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh pemerintah meskipun memerlukan waktu yang cukup lama.

B. Penjabaran Hasil Penelitian

Kaitan teori dengan hasil penelitian mengenai faktor pendorong dan penghambat pemekaran yaitu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat terkadang terjadi secara lambat dan secara cepat, berkaitan dengan pemekaran

wilayah di desa karave terjadi secara lambat dikarenakan adanya faktor yang menghambat terjadinya pemekaran tersebut. Dalam menjelaskan fenomena perubahan sosial terdapat beberapa teori yang dapat menjadi landasan dalam memahami perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Teori perubahan sosial yang dikaitkan dengan masalah faktor pendorong dan penghambat pemekaran wilayah di desa Karave adalah teori evolusi. Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini ialah Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan kerja. Adapun tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif, menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal.

Pada dasarnya pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui otonomi daerah. Akan tetapi pada saat ini, masih banyak daerah atau desa pemekaran belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau belum terwujudkan.

Pemekaran desa ini juga dilakukan untuk melihat aspek ekonomi dan daerah pemekaran, pelayanan publik, dan aparatur pemerintah daerah. Secara umum, daerah otonom baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Di sisi ekonomi, ketertinggalan daerah otonom baru terhadap daerah induk maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan

keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung Bergeraknya perekonomian melalui investasi publik. Di sisi pelayanan publik kinerja daerah otonom baru masih berada di bawah daerah induk. Kinerja pelayanan publik daerah otonom baru dan daerah induk secara umum masih di bawah kinerja pelayanan publik di daerah kontrol maupun rata-rata kabupaten. Di sisi kinerja aparatur pemerintah daerah otonom baru dan daerah otonom induk menunjukkan fluktuasi.

Dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonomi baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Studi mengenai pemekaran wilayah juga penting untuk menyempurnakan konsep otonomi daerah dan pembangunan yang multikultural di daerah.

Dalam hal ini pembangunan ekonomi terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan sosial sekaligus yang membedakannya dengan konteks pembangunan ekonomi terutama adalah dalam hal pengorganisasiannya. Pembangunan sosial lebih mengarahkan pada pemeliharaan penghasilan yang dilaksanakan pelayanan dan pengorganisasian tingkat lokal. Tujuan utamanya berprinsip pada jargon bahwa manusia sebagai

faktor produksi harus tetap sebagai subjek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan sosial dalam arti luas mencakup beberapa sektor pembangunan. Juga, mencakup ruang lingkup pembangunan kesejahteraan rakyat yang merupakan subsistem pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan sosial, pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pelayanan kerja, dan perumahan. Sementara itu, untuk pemeliharaan penghasilan dan pelayanan sosial personal dapat berupa subsistem tersendiri sebagai bagian dari dimensi pembangunan sosial.

Pembangunan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan yang sistematis dari atas yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subjek pembangunan). Kendati demikian, dalam perencanaan pembangunan, namun pada akhirnya keterlibatan dalam proses perencanaan dari bawah sulit sekali dilaksanakan. Ini berbeda dengan pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang dapat melepaskan diri dari keterkaitan kepada struktur organisasi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial dalam masyarakat dan juga perubahan tersebut berlangsung secara luas, bukan hanya pada sektor ekonomi tetapi juga pada bidang sosial dan politik.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

No	Informan	Wawancara	Interpretasi	Teori
1	MAKMUR	Pemekaran dilakukan karena adanya rentang kendali di daerah, terus kemudian dengan adanya pemekaran tentu kita mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja	Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya pemekaran diharapkan adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Perubahan sosial
2	SUWANTO	Untuk memekarkan suatu wilayah maka adanya syarat yang harus dipenuhi oleh daerah tersebut apakah layak tidaknya. Sehingga dengan adanya pemekaran kita akan melihat bagaimana dampak kedepannya kepada masyarakat, maksudnya	Pemekaran tidak terjadi dengan mudahnya karena harus memenuhi syarat terlebih dahulu apakah layak tidaknya daerah tersebut dimekarkan.	Perubahan Sosial

		<p>disini apakah kesejahteraan masyarakat akan meningkat</p>		
3	SUWANTO	<p>Pemekaran ini menjadi cerminan masyarakat daerah di desa kami. Pembangunan di desa karave sudah semakin maju karena masyarakat juga yang turut aktif. Contohnya pada PLN akan dimasukkan di desa ini, awalnya terkendala oleh kelapa sawit masyarakat, setelah itu masyarakat setuju untuk melakukan penebangan kelapa sawit tersebut untuk dipasangkan tiang listrik.</p>	<p>Dengan adanya pemekaran tersebut dapat menjadikan contoh bagi daerah lainnya, karena dengan adanya pemekaran pembangunan yang ada di desa akan semakin meningkat</p>	<p>Perubahan Sosial</p>

4	ROSMALA	<p>Aparat pemerintah setelah terjadinya pemekaran sudah transparan dan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan terkait pengurusan-pengurusan di pemerintahan</p>	<p>Pemerintah juga sangat membantu masyarakat mengenai keperluan pengurusan yang ada dipemerintahan, sehingga urusan masyarakat pun dapat selesai dengan cepat.</p>	<p>Perubahan Sosial</p>
5	MAKMUR	<p>saya setuju dengan pemekaran ini karena tercipta suasana yang teratur dan tidak ada konflik yang timbul. Mereka semua setuju untuk kemajuan desa yang lebih baik</p>	<p>Pemerintah dan masyarakat sangat setuju dengan adanya pemekaran, disamping untuk kemajuan desa dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Perubahan Sosial</p>

6	MAKMUR	Keterbatasan sumber daya manusia, aparatur dalam arti kata ketersediaan pegawai di Desa pasti terbatas, untuk mengelola pemerintahan Desa itu juga aparat Desa juga banyak yang tidak mampu untuk melaksanakan pemerintahan ini terutama mengelola dana yang cukup besar.	Setiap daerah pasti memiliki kendala yang dihadapi . untuk mengelola pemerintahan desa itu tidak mudah, perlu adanya keahlian yang dimiliki.	Perubahan Sosial
---	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Melihat hasil interpretasi di atas memberikan bukti bahwa untuk melakukan suatu pemekaran ada faktor pendorong dan penghambat terjadinya pemekaran. Dengan adanya faktor tersebut maka menjadi tantangan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam hal mewujudkan terjadinya pemekaran wilayah tersebut. Dan juga melalui hasil interpretasi diatas kita dapat melihat dengan adanya pemekaran wilayah maka meningkat pula infrastruktur pemerintahan di Desa Karave dan juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

D. Cara kerja Teori

Sebelum peneliti menguraikan cara kerja teori pada hasil penelitian ini terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan teori yang terdapat pada penelitian ini yaitu

1. Teori Perubahan Sosial

Dalam menjelaskan fenomena perubahan sosial terdapat beberapa teori yang dapat menjadi landasan dalam memahami perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini ialah Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan kerja. Adapun tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif, menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal.

Dalam teori perubahan sosial, sudah tentu dipengaruhi oleh waktu. Teori perubahan secara lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam interval waktu yang cukup lama dan disertai dan perubahan-perubahan dan terjadinya pergeseran sosial secara perlahan.

Dari hasil penjelasan di atas maka dapat dianalisis bahwa:

Implikasi dari adanya pemekaran wilayah yang terjadi di desa karave telah mengalami perubahan sosial, hal ini dapat dilihat dari indikator ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yang meningkat karena secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbandingan ketersediaan sarana ekonomi dari sebelum dan

setelah pemekaran mengalami perubahan yang pesat dikarenakan jumlah pembangunan menjadi sangat banyak dan jauh berkembang. Implikasi pemekaran desa merupakan pengaruh yang kuat yang dapat menimbulkan akibat seperti meningkatkan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana jalan, jenis pekerjaan, dan pendapatan. Oleh karena itu, implikasi sosial pemekaran desa sangat penting dalam meningkatkan pembangunan, karena dengan pemekaran disini dapat berdampak positif terhadap pengembangan suatu desa.

Dengan adanya pemekaran diharapkan adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemekaran tidak terjadi dengan mudahnya karena harus memenuhi syarat terlebih dahulu apakah layak tidaknya daerah tersebut dimekarkan. Pemerintah juga sangat mendukung terjadinya pemekaran yang terjadi di desa karave. Dengan adanya pemekaran dapat menjadikan contoh bagi daerah lainnya, karena dengan adanya pemekaran pembangunan yang ada di desa akan semakin meningkat. Dengan adanya perubahan sosial maka terjadi peningkatan di desa dan akan semakin memudahkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembentukan daerah harus dipertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan-pertimbangan dari aspek politi, sosial, budaya dan syarat lainnya yang memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah.

Semangat otonomi daerah ternyata membawa dampak yang besar bagi wilayah yang siap dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Tak terkecuali pada Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara yang mulai menapaki pembangunan daerahnya. Berdasarkan penelitian penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Dampak pemekaran desa adalah pengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat seperti meningkatkan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana jalan, jenis pekerjaan, dan pendapatan. Oleh karena itu, dampak pemekaran desa sangat penting dalam meningkatkan pembangunan, karena dengan pemekaran disini dapat berdampak positif terhadap pengembangan suatu desa. Dengan adanya pemekaran wilayah yang terjadi di Desa Karave berdampak positif karena dapat meningkatkan pembangunan, sarana pendidikan, sarana

kesehatan, sarana jalan, jenis pekerjaan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pada pemekaran desa tidak terlepas pada faktor pendorong dan penghambat terjadinya pemekaran. Pada pemekaran Desa Karave pemerintah sangat mendukung. Pemerintah yang sebagai pelayanan publik memberikan fasilitas-fasilitas guna melancarkan proses pemekaran. Pemekaran desa juga terjadi karena adanya rentang kendali di daerah, dan dengan adanya pemekaran di Desa Karave pemerintah mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mengsinergikan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Paad desa karave keterbatasan sumber daya manusia aparat desa disitu mengalami kendala dalam proses pengelolaan dana, karena di dalam proses tersebut dibutuhkan keahlian dalam pengelolaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implikasi pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara, maka adapun saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya pemekaran desa diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah pemekaran Desa Karave ketersediaan bahan pokok sarana sosial dan ekonomi di berbagai pelosok diharapkan meningkat.
2. Bagaimana agar sinergi pemberdayaan yang saling terkait antara aparat desa sehingga terpadu pada saat mengembangkan tingkat desa.
3. Diharapkan dengan adanya faktor pendorong pemekaran maka pemerintah lebih meningkatkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak menjadikan faktor penghambat pemekaran sebagai kelemahan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yang ada di suatu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Edisi Revisi 2005. Jakarta: FISIP UI Press.
- Adi Isbandi Rukminto. (2012). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2001). *Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: BPS Pusat.
- Bryant, C. and L.G. While. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta. LP3ES.
- Biro Pusat Statistik
- Budirman. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta. Gramedia.
- Creswell, W. Jhon. (2010). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.
- Djoyohadikusumo. (1990). *Kesejahteraan Sosial*. Angkasa: Bandung.
- Friendlander. (1980). *Partners in Evaluation, Evaluating Development and Community Programmes with Participants*. London: MacMillan Education Ltd.
- Hasriani. (2016). *Study Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi Ekonomi. [sitedi.uho.ac.id>upload_sitedi](http://sitedi.uho.ac.id/upload_sitedi).
- Hikmat, R. Harry. (2010). *STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Bandung: Humaniora Utama Press
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>
- <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/implikasi.html?espv=1>
- [Imam Sapi'i. \(2013\). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur. Artikel Ilmiah, 1 \(1\): 1-7](#)
- J. Kaloh. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Jhingan, M.L. (1988). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: CV. Rajawali
- Kartakasmita. (1997). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES

- Katz. (1992). *Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta Renika Cipta.
- Khan. A.J. (1979). *Theory and Practice of Social Planning*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lariky EOS. (2012). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat*. Skripsi Ekonomi Islam. repository.in-suska.ac.id>...
- Midgley, James. (1995). *Social Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication Ltd.
- Nurdin Fadhil M. (1990). *Pengantar Study Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Angkasa.
- Pohan Siddik Zafar. (2015). *Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008-2014 Terhadap Perkembangan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara*. *Politika*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, Hal 25.
- Poerwardaminta. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pn. Balai Pustaka.
- Rakhmat. (2013). *DIMENSI STRATEGIS MANAJEMEN PEMBANGUNAN*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasyid. (1997) dalam Hasriani (2016). *Study Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* [Skripsi]. Kendari.
- Rambe Kamarulzaman. (2013). *Makna Pemekaran Wilayah*. Ctk. Pertama, Expose, Jakarta Selatan.
- Risnawati R. (2016). *Pembangunan Ruang Sebagai Kota Penyangga Masyarakat* [Skripsi]. Makassar.
- Santoso Lukman. (2017). *Implikasi Pemekaran Daerah*. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol 7 No 1 hal 261-263
- Sella Ayu Wandira. (2014). *Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. *Perspektif*/ Vol 7 No 1 hal 291
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sunarno Siswanto. (2009). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Suciati. (2017). *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Susanti. (2014). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara*. *JEP*. Vol. 3, No 2 Juli 2014.

- Spicker, Paul. (1988). *Principles Of Social Welfare*. London: Routledge.
- Syaodih Ernady. (2015). *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung: PT Refika Aditama
- Syarifuddin, dkk. (2018). *Buku Panduan Penulisan Skripsi (Khusus Bagi Mahasiswa Bidang Kajian Penelitian Sosial Budaya)*. Makassar
- Todaro. (1997). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Trisnawati Dian. (2014). *Pemekaran Daerah di Kbupaten Bintan (Study Kasus Pemekaran Kabupaten Bintan Timur)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Wendra Yunaldi. (2010). *Analisis Pemekaran Daerah*. Dimuat pada tanggal 15 Januari 2018. Artikel ini (batamtoday.com/berita/37367-

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

- a. Pengambilan data di kantor Desa Karave



- b. Susunan organisasi pemerintah Desa



c. Dokumentasi wawancara dengan Asisten I Bupati Mamuju Utara



d. Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Karave



e. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka konsep

Gambar 2 Peta Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 3 Struktur organisasi pemerintahan Desa Karave Kecamatan Bulutaba
Kabupaten Mamuju Utara

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah penduduk Desa Karave

Table 2 Batas wilayah administratif desa karave

Table 3 keadaan ekonomi desa karave

Table 4 bidang pertanian berdasarkan jenis tanam desa karave

Table 5 bidang peternakan berdasarkan jenis tanam desa karave

Table 6 bidang pendidikan desa karave

Table 7 bidang industri kecil berdasarkan jenisnya desa karave

RIWAYAT HIDUP



Syahrani Nasria, lahir di Bone, pada tanggal 5 Februari 1997. Penulis adalah anak ke dua dari dua bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Andi Syarifuddin dan Rosmala, saat ini keluarga penulis, Ayah, Ibu dan Kakak berdomisili di Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat.

Penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 2002-2008 di SD INPRES KARAVE Kabupaten Mamuju Utara. Kemudian melanjutkan ke tingkat pendidikan di SMP NEGERI 1 BULU TABA Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2008-2011, dan mulai mengikuti kegiatan dan organisasi di sekolah dan melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 BULU TABA Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2011-2014. Penulis mengambil program studi strata satu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Sosiologi. Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di jenjang pendidikan sebagai bekal kehidupan dunia akhirat dan semoga mendapat rahmat dari Allah Swt di kemudian hari serta dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga.

